

# Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Sita Lima Mobil Mewah Riza Chalid

JAKARTA, BN - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah kendaraan yang diduga milik tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah, Riza Chalid. Total ada lima kendaraan yang disita penyidik. Pantauan media Selasa (5/8/2025), lima mobil mewah itu diparkir berjejer di depan Gedung Jaksa Agung Muda



Mobil mewah Riza Chalid yang disita Kejagung. (ist)

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

# PROYEK BKK DESA DOROGOWOK RP 1,475 M HANCUR



## ❑ Kades dan Anggota DPRD Jatim PKS Patut Diperiksa

LUMAJANG, BN - Proyek Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dengan nilai sangat fantastis Rp 1. 475.000.000, - (1,475 Miliar), sudah hancur. Diduga proyek dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Bahkan proyek dari Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu dikerjakan asal jadi dan anggarannya diduga jadi bancakan oknum tidak bertanggungjawab.

KETERANGAN di- Dusun Panggung Gempol himpun Bidik Nasional (BN) sepanjang 870 m banyak menyebutkan, proyek di yang hancur. Pekerjaan

drainase tersebut tidak lurus berbelok-belok seperti ular kobra, karena pekerjaannya terburu-buru mengejar waktu dan tidak profesional. Diduga pekerjaan hanya formalitas saja terkesan hanya mencari keuntungan pribadi untuk memperkaya diri sendiri dengan ngemplang uang negara/korupsi.

Menurut sumber BN, Kades Dorogowok Sura'i, awal perencanaan bersama-

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Kantor Desa Dorogowok



Novi Bendahara Desa bersama KAUR pada saat dikonfirmasi BN Selasa, (25/03/2025), pukul 12.06 WIB. (SON)



Pekerjaan drainase Dusun Panggung Gempol Hancur Lebur.

## Polda Jatim Bongkar Beras Oplosan Produksi Sidoarjo



Kapolda Jatim Irlen. Pol. Nanang Avianto saat cek TKP. (ist)

SIDOARJO, BN - Upaya tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Jaksa Agung dan Kapolri, untuk mengusut tuntas kasus beras oplosan atau tidak sesuai mutu standar klaim kemasan pada saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025.

Kemudian ditindak lanjuti tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur langsung melakukan sidak di Pasar Tradisional

■ Bersambung ke hal.10 kol.1

## TERSANGKA, EKS KEPALA BAPPEDA SIDOARJO BELUM DITAHAN

### ❑ Kasipidsus Kejari Sidoarjo John Franky : Rawat Jalan, Kami Akan Cek Dulu Kesehatannya



Mantan Kepala Bappeda Sidoarjo, Heri Soesanto saat diperiksa di Persidangan Tipikor Surabaya. (Teddy Syah)



Kasipidsus Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi (tengah), bersama tim penyidik kejaksaan. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo belum melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, Heri Soesanto. Hingga kini, yang bersangkutan masih

menjalani rawat jalan usai perawatan di RSUD Notopuro Sidoarjo.

Heri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

## Oknum Polsek Bulu Temanggung Diduga Lepas Truk 'Penggarong' Solar Subsidi



Baju warna hitam topi putih sopir pengangsu Solar Subsidi di SPBU (Tim)

TEMANGGUNG, BN - Disaat awak media melintas di SPBU 44.562.08 Danupayan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung Jawa Tengah menemukan Truk pengangsu ('penggarong') solar subsidi, Selasa 29/7/2025.

Saat diwawancarai awak media sopir pengangsu solar subsidi mengatakan, "memang benar saya lagi ngangsu solar subsidi mas, bos saya bernama Prasetyo orang Solo," ujarnya jujur.

Selanjutnya sejumlah awak media meluncur ke Polsek Bulu Kabupaten

Temanggung dengan maksud ingin melaporkan temuan tersebut.

Selang beberapa menit awak media datang bersama 2 anggota Polsek Bulu menggunakan mobil patroli, namun sangat disayangkan kinerja 2 anggota Polsek Bulu tidak bertindak sebagai Aparat Penegak Hukum pada semestinya, diduga kuat ada unsur kesengajaan melepaskan truk yang diduga mafia pengangsu solar.

Pasalnya, setibanya dilokasi 2 oknum anggota Polsek Bulu tidak turun dari mobil patroli, sama sekali tidak bertindak apapun, justru menyuruh sopir truk yang diduga ngangsu solar pergi ke Polsek tanpa dikawal

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

## Warga Pertanyakan Proyek "Siluman" Peningkatan Jalan Hotmix Desa Kwaron Diwek



Proyek jalan hotmix Dusun Nglerep, Desa Kwaron diduga tidak sesuai spek, bahkan terkesan asal- asalan

JOMBANG, BN - Proyek peningkatan jalan hotmix Dusun Nglerep, Desa Kwaron, Kabupaten Jombang diduga dikerjakan secara asal- asalan bahkan diduga menyimpang dari spek. Pada proyek jalan hotmix tersebut tidak ditemukan nya papan nama proyek, sehingga layak di sebut proyek "Siluman".

Keterangan dihimpun Bidik Nasional (BN), Sayang anggaran negara yang diberikan agar bisa dinikmati warga setempat, ternyata pada pengerjaan proyek jalan hotmix itu di kerjakan kurang bagus, bahkan mutu kualitas nya buruk. Terkesan bila dipandang mata orang pasti geleng geleng kepala bila melihat proyek jalan aspal (hotmix) tersebut. Pengerjaan terkesan carut marut bila melihat cara penataan proyek hotmix di Dusun Nglerep, Desa Kwaron tersebut.

Proyek "Siluman" jalan hotmix tersebut bilbilang dikerjakan oleh kontraktor nekat. Bahkan sejak awal pekerjaan hingga selesai warga tidak mengetahui sumber dananya dari mana

serta anggarannya berapa, karena tidak ada papan nama proyek.

Saat BN bertanya pada beberapa warga setempat, terkait anggaran dan dananya dari mana, warga tidak mengetahui anggarannya. "Anggarannya berapa dan darimana saya tidak tahu, yang mengerjakan juga bukan orang sini, habis dari sini pindah ke Dusun Kwaron," terang warga, Senin (21/7).

Masih di tempat yang sama, tak jauh beda dengan keterangan tetangganya, warga juga mengatakan, "pengerjaannya malam hari, belum ada satu bulanan, jalan ini pekerjaannya terkesan asal - asalan,

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

## Usut Alih Fungsi Lahan Sungai Asem, Timsus Kejari Geledah Kantor ATR/BPN Lumajang



Timsus Kejari saat Geledah Kantor ATR/BPN Lumajang. (son)

LUMAJANG, BN - Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi (TimSus) Kejaksaan Negeri Lumajang melakukan penggeledahan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lumajang pada Jumat 1 Agustus 2025. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam alih fungsi Sungai Asem menjadi kawasan kavling perumahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, Kosasih, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus korupsi. "Kami telah melakukan upaya paksa di kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini," ujarnya.

Dari hasil penggeledahan, TimSus Kejari Lumajang menyita beberapa dokumen penting, termasuk 3 bendel peta wilayah, 3 bendel permohonan sertifikat asal tanah, 1 lembar cetakan pola ruang dari ArcMap, dan 3 lembar cetakan peta pola ruang RT/RW

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

## LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL Membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/Ci14 Bluru Permai, Bluru Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com



# Tukang Tagih Bank Daerah di Kabupaten Kediri Diduga Teror Guru saat Mengajar



Bukt LP Korban saat melapor ke Polres Kediri. (Nyoto BN)

**KEDIRI, BN** – Sungguh Ironis apa yang dialami seorang Guru MI Berinisial Z di Kabupaten Kediri, karena angsuran yang kurang, pihak Debt Collector (DC) Bank Daerah Kabupaten Kediri diduga minta Motor untuk jaminan karena keterlambatan bayar angsuran, padahal yang dijaminan Sertifikat. Adanya ancaman

teror oleh pihak DC Bank Daerah Kabupaten Kediri membuat Z harus memberikan motor yang biasa dibuat kerja sehari-hari.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 23 Juli 2025, saat dua petugas penagih mendatangi sekolah tempat Z mengajar. Mereka menagih utang secara terbuka di tengah proses belajar, meskipun kepala sekolah telah meminta agar penagihan ditunda hingga KBM selesai. Namun, permintaan tersebut diabaikan, dan penagihan tetap dilakukan di hadapan siswa dan guru lainnya.

Z mengakui adanya tunggakan cicilan sejak April akibat kesulitan ekonomi, namun ia menyatakan se-

lama ini rutin melakukan pembayaran, meski terkadang tidak sesuai nominal. Bahkan, sebagai bentuk itikad baik, Z akhirnya menyerahkan dua motor miliknya karena dibawah tekanan meskipun diantar sendiri ke Bank Daerah, yakni Yamaha Vixion dan Honda Vario, untuk menutupi kewajiban. Ironisnya, selain dua kendaraan tersebut, petugas juga menyita berbagai barang pribadi lain yang tidak tercantum dalam perjanjian pinjaman maupun akta jaminan. Penyitaan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, seperti akta fidusia atau putusan pengadilan, yang jelas-jelas melanggar peraturan hukum dan prosedur yang berlaku.

Tak hanya itu, intimidasi juga dirasakan oleh istri Z. Salah satu petugas bahkan

melontarkan pernyataan yang sangat tidak pantas saat mendatangi rumah korban: “Kalau suami Anda mati, itu bisa selesai, Buk.” Ucapan tersebut memicu trauma dan tekanan mental yang mendalam bagi istri Z, serta menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga.

Z akhirnya menempuh jalur hukum bukan semata untuk membela diri, tetapi sebagai langkah memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi konsumen kecil yang sering terpinggirkan. Saat di konfirmasi Sigit sebagai salah satu Direksi Bank Daerah Kabupaten Kediri mengatakan kepada koran ini bahwa kejadian ini sudah dilaporkan pada pihak kepolisian, dan kita hormati proses hukum yang berjalan, ungkapnya. (Nyoto)

# Sosialisasi Pembebasan Lahan Perhutani di KRPH Sampang dan BKPH Dander KPH Bojonegoro, Lancar

**BOJONEGORO, BN** – Dalam Rangka memperkuat pertahanan negara, Kementerian Pertahanan melalui Perhutani dan Pemerintah Desa (Pemdes) Buntalan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro melakukan sosialisasi pembebasan lahan Perhutani di KRPH Sampang dan BKPH Dander KPH Bojonegoro yang akan digunakan atau dibangun Markas Batalyon pembangunan dan Brigif TP. 34 di kawasan Perhutani yang saat ini dikelola masyarakat sekitar untuk bercocok tanam. Acara diselenggarakan di pendopo Balai Desa Buntalan, Kamis (24/07/2025).

Kepala Desa Buntalan kecamatan Temayang Bojonegoro, dr Sujoko dalam sambutan nya menyampaikan bahwa sesuai kebutuhan pemerintah untuk menyanggah ketahanan pangan rakyat dan pengamanan teritorial, negara membutuhkan Batalyon dan Brigif baru untuk menopang perekonomian.

Namun demikian, secara ekonomi kita akan sedikit berkurang akibat pembebasan lahan garapan yang selama ini dikelola sebagai sumber mata pencaharian yang akan terbebaskan. Akan tetapi ini dibutuhkan negara sehingga kita semua harus rela melepas garapan tersebut,” ungkapnya.

Sementara, Pemerintah desa dan masyarakat yang



Sosialisasi pembebasan lahan Perhutani di KRPH Sampang dan BKPH Dander KPH Bojonegoro di pendopo Balai Desa Buntalan, Kamis (24/07/2025). ( Foto: Pri BN Bojonegoro.)

ekonomi lewat UMKM juga menggeliat dengan banyaknya personil TNI yang akan berdomisili di markas nantinya. Berharap masyarakat yang kehilangan garapannya di lahan perhutani, masih banyak lahan pertanian yang lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam,” imbuhnya.

“Mari kita dukung penuh program pemerintah ini, semoga banyak manfaatnya dan desa kita lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera,” pungkasnya.

Sosialisasi pembebasan lahan perhutani untuk pembangunan Batalyon TP.886 dan Brigif TP.40. dihadiri perwakilan dari Kodim 0813. Bojonegoro, KPH Bojonegoro, Cabang Dinas kehutanan Bojonegoro, LMDH Sampang dan masyarakat penggarap lahan hutan yang terdampak pembangunan ini. (pri)

tergabung dalam LMDH akan sepenuhnya mendukung program pemerintah tersebut. KRPH Sampang, BKPH Dander akan membebaskan seluas 97.31.42 hektar untuk Brigif TP34.

“Harapan kami dengan dibangunnya Batalyon baru bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dengan banyak menyerap tenaga kerja dalam pembangunan markas tersebut,” ucapnya.

Ditambahkan, “Selain penyerapan tenaga kerja saya berharap pertumbuhan

## Kejari Sidoarjo Restorative Justice Tersangka Penggelapan Motor untuk Bayar Kos



Tersangka saat menerima berkas Restorative Justice dari Kejari Sidoarjo. (Foto: Teddy/BN.com)

**SIDOARJO, BN** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo menerapkan pendekatan restorative justice terhadap kasus penggelapan sepeda motor operasio-

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

## Eksekusi Putusan MA, Kejari Sidoarjo Bakal Tahan Dirtek Perumda Delta Tirta

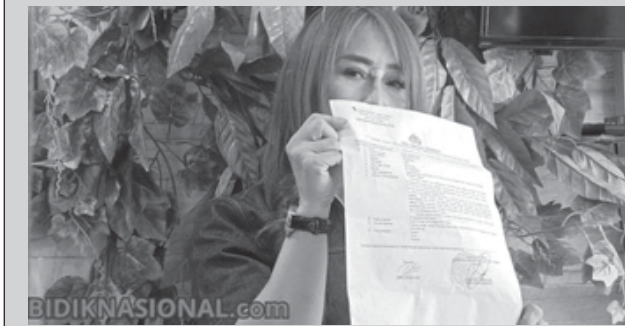


Terpidana Slamet Setiawan saat dilakukan penahanan di Kejari Sidoarjo. (Teddy)

**SIDOARJO, BN** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memastikan akan melakukan eksekusi terhadap

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

# Ditemukan Tanda Cupang di Dada, Suami Aniaya Istri di Sepanjang Sidoarjo



Korban saat memberikan keterangan pers di tempat salon kecantikkannya. (Foto: ist)

**SIDOARJO, BN** – Seorang wanita pemilik salon kecantikan berinisial NH (45), warga Jl. Taman Permata Indah Blok-G, Sepanjang, Sidoarjo, melaporkan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke Polsek Taman pada Minggu (20/7/2025).

NH mengaku menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh FR (46), warga Pondok Buana Blok-Q, Sidoarjo, yang

merupakan suaminya dalam pernikahan siri. Kejadian kekerasan tersebut terjadi di halaman rumah Korban. Akibat tindakannya FR, korban mengalami luka lebam di bagian bahu tangan kirinya.

“Jadi pada hari Minggu itu saya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suami siri saya. Dia mencengkeram tangan saya dan mendorong hingga saya terpendal dan menabrak pagar depan rumah,” ungkap korban saat diwawancarai, Rabu (30/7/2025).

Kekerasan tersebut dipicu oleh pertengkaran setelah NH menemukan tanda cupang merah di dada FR. Situasi ini menimbulkan kecuguran terhadap kesetiaan FR.

“Awalnya saya curiga karena dia tidak seperti biasanya, tidak mau buka baju saat santai. Dan saat akan berhubungan pada dini hari Minggu itu, saya kaget melihat tanda cupang di dadanya, lalu kami bertengkar,” lanjutnya.

Pertengkaran berlanjut hingga sore hari. Puncaknya, terjadi tindakan kekerasan pada pukul 19.00 WIB saat NH melarang FR keluar rumah. “Dia marah karena saya tidak mau diajak berhubungan malam itu. Saya curiga dia mau pergi menemui wanita lain yang meninggalkan tanda cupang itu. Karena saya larang, dia jadi emosi,” ujar NH.

Usai insiden tersebut, NH melaporkan kejadian ke Polsek Taman untuk meminta perlindungan hukum. Pihak Polsek Taman merespons cepat dan mendatangi tempat kejadian perkara, setelah menerima laporan tersebut.

“Beruntung anggota Polsek datang ke lokasi. Katanya, ada tetangga yang mendengar keributan di rumah saya dan langsung melapor,” terang NH.

Polsek Taman telah memeriksa korban dan menerbitkan Surat Pengaduan Masyarakat dengan nomor: LPM/235/VII/2025/POLSEK TAMAN/POLRES SIDOARJO, Senin (21/7). Selain itu, polisi juga membawa NH ke rumah sakit untuk melakukan visum atas luka yang dialaminya.

Diketahui, NH dan FR telah menjalani hubungan pernikahan siri sejak tahun 2023. Selama menjalin hubungan tersebut, keduanya kerap terlibat konflik. FR sendiri diketahui telah memiliki istri sah dan dua orang anak dari pernikahan resminya.

“Saya menerima dia sebagai suami meski dia punya istri sah. Tapi belakangan saya dengar dia punya kekasih lain lagi selain saya dan istri pertamanya,” kata NH.

NH meyakini bahwa tanda cupang tersebut bukan berasal dari istri sah FR, melainkan dari wanita lain yang dugaannya ada kekasih barunya. Hingga Rabu (30/7/2025), Polsek Taman telah memanggil dan memeriksa dua saksi yang mengetahui kejadian kekerasan tersebut.”Hari ini dua saksi saya hadirkan sesuai permintaan penyidik. Lalu, dijadwalkan lagi, Sabtu (2/8/2025), FR akan dipanggil untuk dimintai keterangan,” pungkas NH. (Teddy Syah)

# Wabup Mimik : Tingkatkan Kompetensi dan Bentuk Siswa Sehat Jasmani Rohani



Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana. (Foto: ist)

**SIDOARJO, BN** – Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana secara resmi membuka kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) jenjang Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Sidoarjo, Senin (4/8/2025) di Pendopo Delta Wibawa.

Dalam sambutannya, Wabup Mimik menyampaikan apresiasiya kepada seluruh guru PJOK yang terus berkomitmen dalam mendidik dan membina siswa, khususnya di bidang olahraga. “Melalui kegiatan ini, saya berharap guru PJOK semakin siap menghadapi tantangan dunia pendidikan yang dinamis. Guru harus terus belajar, memperbaharui metode, dan meningkatkan kompetensi agar pembelajaran di sekolah semakin berkualitas dan membentuk siswa yang sehat jasmani dan rohani,” ujar Mak Mimik, sapaan akrabnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Tirta Adi, menyampaikan bahwa kegiatan PKB yang diikuti oleh 563 guru PJOK ini merupakan program rutin untuk memperkuat kapasitas dan kualitas guru, meningkatkan profesionalisme guru PJOK dalam mendukung pembelajaran yang aktif, sehat, dan menyenangkan.

“Guru PJOK memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aktif. Melalui PKB ini, kami ingin para guru bisa terus berkembang, mengikuti perkembangan kurikulum, serta mampu menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik,” terang Tirta. (yah)

### BERITA MINGGUAN INVESTIGASI



: Nino Wiwantara. **BLITAR** : Budi Sastro. **PASURUAN** : Toddy Pras Hendarto, **PROBOLINGGO/LUMAJANG** : Sonny Narwani. **JEMBER** : Agus Budiono. **SITUBONDO** : Agung Chornelis (Kabi), Hari Sulisty. **BONDOWOSO** : Rukwandanu. **BANYUWANGI** : Djoni DW (Kabi), Suropto, Sugeng Purnomo. **JAWA TENGAH** : **BLORA** : Mugianto (Kabi), Tiono Indah Handayani, Ali Mustofa, Nurcahyanto. **REMBANG** : Didik Eko Sulistiwan. **WONOGIRI** : Heryanto. **SEMARANG RAYA** : Peni Kusumawati (Kabi), Catur Prasetyo. **PEKALONGAN RAYA** : Sodikin (Kabi), M. Khairul Anwar. **BATANG** : Rudiono (Kabi), Bambang Hadi. **KENDAL** : Peni Kusumawati, Doni Kurniawan. **KUDUS** : Budi Setiawan. **GROBOGAN** : Heru Budianto. **SALATIGA** : Susilo Haryadi. **BOYOLALI** : Hendardi. **TEMANGGUNG** : Ahmad Mukhlis (Kabi), Novan Argunanto. **JAWA BARAT** : **CILACAP** : Eko Prionggo Dewo, Suyatno. **MAGELANG** : Mamo, ST. **BANDUNG** : Zaenal Ikhsan (Kabi). **CIAMIS/KOTA BANJAR/PANGANDARAN** : Asep Sujana. **SUMEDANG** : Emawan Hidayat. **SUBANG** : Tohir (Kabi), Sumantri, Anay, Kandiawan, Ahmad Saehu. **INDRAMAYU** : Candra Shema Restullah (Kabi), Ragil Pangestu. **DEPOK** : Harahap (Kabi), Fajar. **BEKASI** : Abdul Rachman. **KUNINGAN** : Edwar Panata Muda. **PURWAKARTA** : Anthon Pontoh, Endin. **BOGOR** : Liswandi (Kabi), Wardiyansyah Saputra, Firdaus. **JAKARTA/BANTEN** : Ayom Cahyono (Kabi), Dian Wahyudi. **BALI** : Agung Wiarto. **SULAWESI SELATAN** : **SOPPENG/MAJO** : Anwar Paturusi (Kabi). **PINRANG** : Moh Sabir (Kabi), Subhan Hapid. **BONE** : Edy Suspi AB. **SULAWESI UTARA** : Hilda Pusung. **MANADO** : Affandi Masloman. **KOTAMOBAGU/BMR** : Arman Muna (Kabi), Moh Setio Wanoto. **GORONTALO** : Rifly Tama'un. **HALMAHERA SELATAN** : Anwar Suleman. **KALIMANTAN TENGAH** : **MURUNG RAYA/BARITO UTARA** : Effendi (Kabi). **KALIMANTAN BARAT** : Sofyan Hadi. **KETAPANG** : Sukarto. **KALIMANTAN UTARA** : Syamsudin (Kabi). **KEPRI** : **BENGKALIS** : Agung Mulyono. **KOTA BATAM/TANJUNG PINANG/BINTAN** : Handoko **KEP NATUNA**: Amir Hamzah. **RIAU**: Julianton Andohar Maruba Sinaga (Pelalawan). **SUMATERA SELATAN** : **PALEMBANG** : Sirlani. **LAHAT/MUARA ENIM** : Adi Nurahman. **PAGAR ALAM** : Marleo Tanjung. **OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN** : M Azhary MY. **OKU TIMUR** : Nells Sri Wahyuni. **OKI** : Nurlis Oktari. **SUMATERA UTARA**. **KOTA MEDAN**: Muhammad Syaefi Harahap. **LABUHANBATU** : M. Sukma (Kabi). **PAKPAK BHARAT** : Tennang Tumangger (Kabi), Dariono. **DELI SERDANG** : Heri Siswoyo. **ASAHAN** : Tumin P. Sandro Natanael Hulu, Hengky Ames. **NIAS UTARA** : Hadirat Syukur Harefa. **NIAS BARAT** : Odaligo Zai. **TAPANULI SELATAN** : Amir Hamzah Nasution **SUMATERA BARAT** : **PASAMAN**: Suryadarma (Kabi), Refdinal. **LAMPUNG** : WAY KANAN : Arye M Jahri. **LAMPUNG TIMUR** : Nuhyin, Mueshin, Antoni. **LAMPUNG UTARA** : Eka Saputra (Kabi), Triyutika Sari **LAMPUNG SELATAN**: Muhammad Fahreza Khibran Wibowo. **LAMPUNG BARAT** / **PESISIR BARAT** : Taufik **TULANG BAWANG/TULANG BANGAR** : Indra Wijaya, Hendra Jaya. **PRINGSEWU** : Iskandar. **B. BANDAR LAMPUNG** : Suhartono Hariwibowo. **TANGGAMUS** : - **NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES** : Sutrisno (Kabi), Simson Sitepu. **SUBULUSSALAM** : Agus Darminto Bancia (Kabi), Imran Cibro. **ACEH SINGKIL** :Roni Syehrani (Kabi), Nurhalimah. **BIREUM** : Hendra S. **BANGKA BELITUNG**: Agusman Sirait (Kabi), Tamrin. **JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT**: Joni Efendi. **NUSA TENGGAARA BARAT** : **MATARAM**: Hidayatul Aini (Kabi). **PAPUA** : Junjungan Silalahi. **LAYOUT/IT** Nur Hayati **PEMERANAR/ ADMINISTRASI/KEUANGAN**: Dita Zahra Amalia. **PENERBIT** : PT Bidik Nasional Pers (BNP). **AKTE NOTARIS** : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. **SK MENKUMHAM** : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. **AKTE NOTARIS PERUBAHAN** : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. **SK MENKUMHAM PERUBAHAN** : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 **NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO**: 0220105231819. **NPWP**: 72.007.891.4-617.000. **ALAMAT** : Jl. Ikan Lele 2 Blok C1 No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. **JAKARTA** : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. **BANK**: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-8/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. **WEBSITE** : https://bidiknasiona.com. **Percetakan** : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamso No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantumkan Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasiona@yahoo.com/ bidiknasiona1@gmail.com/bidiknasiona2@gmail.com SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI



# Bupati Sidoarjo Tinjau & Rehab Rumah Dua Warga Kurang Mampu di Kecamatan Tarik dan Gedangan



**SIDOARJO, BN** – Untuk memastikan bantuan dan bedah rumah dua warga di Kecamatan Tarik, Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung ke lokasi. Agar bantuan dan bedah rumah itu tidak salah salah sasaran maka Bupati Sidoarjo melakukan kunjungan lokasi di Desa Mindugading dan warga Singogalih.

Bupati Sidoarjo sangat semangat untuk melakukan bantuan kepada warganya yang rumahnya tidak layak huni. Di samping itu Bupati Sidoarjo memang mempunyai karakter sosial yang tinggi, memang beliau juga amanah menjalankan tugasnya untuk melaksanakan kegiatan sosial.

Dua rumah warga kurang mampu di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, akhirnya mendapat bantuan rehabilitasi dari Baznas Sidoarjo. Bantuan tersebut diberikan kepada rumah milik Sulikah, nenek berusia 82 tahun asal Desa Mindugading, serta rumah milik Slamet Agus Siswanto, warga Desa Singogalih. Kondisi kedua rumah ini memang sangat memprihatinkan. Terutama rumah Sulikah, yang hanya berdinding bambu dengan ukuran 5 x 4,5 meter. Rumah itu tampak rapuh, jauh dari kata layak untuk ditempati.

Senin (28/7), Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung meninjau kondisi rumah kedua warga tersebut. Ia datang bersama Ketua Baznas Sidoarjo, M. Chasbil Aziz Salju Sodara serta jajaran Dinas Sosial Sidoarjo. Saat melihat langsung kondisi rumah yang tidak layak huni itu, raut wajah Bupati Subandi tampak diliputi keprihatinan. Ia menyampaikan bahwa program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Lewat program bedah rumah ini, kami ingin memastikan setiap warga Sidoarjo bisa tinggal di rumah yang aman, nyaman, dan layak. Saya tidak ingin ada warga kita yang hidup dalam kondisi rumah yang tidak layak,” tegasnya.

Bupati Subandi juga mengajak semua pihak untuk ikut mendukung program ini. Ia meminta camat dan kepala desa agar lebih proaktif mendata warganya yang masih tinggal di RTLH. Tak hanya itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui ada tetangganya yang tinggal di rumah tidak layak huni.

“Jika ada tetangga yang rumahnya tidak layak, segera laporkan ke kelurahan atau kecamatan. Kami akan tindak lanjuti, agar segera bisa dilakukan renovasi,” ujarnya penuh empati.

Di tengah proses peninjauan, kisah haru datang dari Eny, anak kedua Sulikah. Dengan mata berkaca-kaca, ia menceritakan bahwa ibunya sudah berkali-kali diajak untuk tinggal bersama ayahnya maupun dengan saudara-saudaranya. Namun, sang ibu selalu menolak dengan alasan tidak betah jika harus tinggal di rumah anak-anaknya. “Ibu mboten purun kulo ajak tilem teng griyo kulo (Ibu tidak mau saya ajak tidur di rumah saya – red),” ungkap Eny lirih, menirukan ucapan ibunya.

Menurut Eny, hampir dua tahun terakhir ibunya memilih tinggal sendiri di rumah sederhana itu. Sebelumnya, Sulikah sempat tinggal bersama salah satu saudaranya.

Namun sejak ayahnya meninggal, ia memutuskan kembali ke rumah lamanya, meskipun kondisinya sempit dan memprihatinkan.

“Semua anaknya sebenarnya khawatir, apalagi kalau hujan deras. Kami selalu memikirkan keselamatannya. Tapi ibu selalu berkata, ‘aku

tinggal nang kene ae’.

“Itulah keinginannya, meskipun kami merasa sedih melihat kondisinya,” tutur Eny dengan suara bergetar.

Kisah ini menjadi pengingat bahwa di tengah pesatnya pembangunan, masih ada warga yang membutuhkan uluran tangan. Dengan adanya program bedah rumah dari Pemkab Sidoarjo dan Baznas, harapan untuk hidup lebih layak akhirnya bisa terwujud bagi Sulikah dan Slamet Agus Siswanto.

Bapak Sujani Bupati swasta dan masyarakat sidoarjo sebagai pemerhati kegiatan Bupati sidoarjo dalam kegiatan sosial. Sujani mengapresiasi Bupati H.Subandi dalam semua kegiatan sosial. Termasuk kegitan di kecamatan Tarik ini saya acungi jempol kepada bapak Bupati karenamasyarakat sidoarjo masih banyak yang harus di bantu pungkas Sujani.

Masyarakat Sidoarjo untuk kesejahteraannya belum merata, masih banyak di wilayah pedesaan yang masyarakatnya kurang mampu. Sehingga mereka perlu sekali bantuannya. Apapun alasannya yang namanya masyarakat kurang mampu apabila ada bantuan mereka sanag senang dan bahagia sekali.

Dari sisi sosial bupati pun sangat diapresiasi oleh masyarakat sidoarjo. Masyarakat sidoarjo dimasa sekarang banyak meningkat taraf prekonomiannya, tapi masih tetap ada saja yang kekurangan. Dengan terobosan dan langkah bupati seperti ini maka pihak terkait seperti dinas sosial juga sangat berperan untuk mendata dan mengatasi masyarakat yang kurang mampu ini. Bupati Sidoarjo H. Subandi. SH., Mkn, memang cocok dan pantas jadi pimpinan Kabupaten Sidoarjo karena dalam menjalankan tugas sudah amanah.

Untuk data jumlah penduduk Sidoarjo yang kurang mampu dan berhak menerima bantuan menurut keterangan kepala dinas sosial, Drs.H. Ahmad Misbachul Munir dikatakan, “Kalau tahun kemarin sekitar 580 000 untuk tahun 2025 masih belum tahu karena masih harus membuka data dulu,dan data sudah dianulir,” jelasnya.

Kepala dinas sosial kabupaten Sidoarjo waktu dikonfirmasi lewat telpon selulernya menjelaskan, “Ya mas mohon maaf saya lagi undangan acara di kantor kejaksaan negeri sidoarjo. Kalau sampean konfirmasi terkait data penduduk sidoarjo yg kurang mampu dan berhak menerima bantuan saya harus buka data di komputer dulu, kalau tahun 2024 kemarin ada sekitar 580 ribuan,um untuk tahun sekarang saya belum tahu karena sudah dianulir nunggu info dari saya nanti,” pungkasnya.

Untuk meningkatkan dan bisa melayani masyarakat yang kurang mampu dalam memberikan santunan ahimya bupati dan wabup juga bekerja sama monitoring kelokasi masyarakat yang tidak mampu.

Bupati dan Wabup kompak monitor penyaluran bantuan pangan di Sidoarjo, agar penyaluran bantuan tidak salah sasaran dan untuk memastikan penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat tepat sasaran, Bupati Sidoarjo Subandi dan Wakil Bupati (Wabup) Mimik Idayana kompak turun langsung ke lokasi penyaluran, Rabu (30/7/2025).

Bupati Subandi memantau penyaluran bantuan pangan di tiga desa di Kecamatan Gedangan. Yakni Desa Tebel, Desa Keboansikep, dan Desa Wedi. Sementara Wabup Mimik Idayana memantau penyaluran di Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran, dan Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono.

Selain untuk memastikan penyaluran bantuan beras tepat sasaran, Bupati Subandi juga ingin memastikan seluruh warga Sidoarjo terlindungi BPJS Kesehatan.

Bupati Subandi menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras kali ini untuk alokasi bulan Juni dan Juli. Perbulan pemerintah menjatak beras sebanyak 10 kg. Sehingga kali ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) langsung menerima 20 kilogram beras.

“Penyaluran bantuan pangan beras pemerintah pusat harus dikawal bersama. Jangan sampai bantuan tersebut salah sasaran atau diterima oleh yang tidak berhak. Bantuan harus benar-benar disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Karena bantuan ini tujuannya untuk membantu ekonomi warga dalam mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari,” kata Subandi.

Dia juga meyakinkan kualitas beras bantuan yang diberikan sangat baik. Beras jenis medium berkualitas. Bupati mengecek sendiri kondisi berasnya. Sangat layak dikonsumsi. Oleh karenanya ia meminta beras



yang diterima dapat dikonsumsi sendiri. Jangan sampai dijual. “Beras niki buat dikonsumsi damel keluarga sendiri ngeh. Kalau pulang dari sini jangan mampir toko, terus berasnya dijual,” pesan bupati.

Dalam kesempatan itu Bupati H. Subandi juga memastikan masyarakat terlindungi BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jika masih ada yang belum, diminta agar segera menemui kepala desa setempat. Minta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar terdaftar dalam kepersertaan BPJS Kesehatan.

Pesan serupa disampaikan Wabup Mimik Idayana saat monitoring bantuan pangan beras di Desa Sidokepong, Kecamatan Buduran dan Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono. Wabup menegaskan bantuan beras untuk warga ini agar dikonsumsi sendiri dan tidak boleh dijual. “Saya pesan agar jangan dijual, manfaatkan untuk konsumsi sendiri,” pesannya.

Mimik menyebut bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan distribusi bantuan sosial berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan.

Dalam kunjungannya, Mimik Idayana menyapa langsung warga penerima manfaat, memastikan proses pembagian berjalan tertib, dan mengecek kualitas beras yang diterima. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, dalam kondisi layak konsumsi dan jumlah yang sesuai,” ujarnya.

Kepada warga Mimik juga berpesan agar jika ada warga yang melihat jalan lubang, mati lampu, hingga warga yang butuh bantuan segera lapor agar segera ditindaklanjuti. “Saya juga mohon agar bantu doa untuk pak Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo agar selalu sehat untuk memimpin Sidoarjo, dan menyejahterakan masyarakat Sidoarjo,” pesan Wabup.

Siti Nurhayati (52), salah satu warga Jumputrejo mengungkapkan rasa terima kasih karena bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarganya. “Alhamdulillah dapat bantuan beras. Bisa buat hemat belanja. Terima kasih Bu Wabup dan pemerintah,” ucapnya sambil tersenyum.

Hal serupa disampaikan Widarti, salah satu penerima bantuan bersyukur kembali mendapatkan bantuan beras. Dua tahun lalu bantuan serupa juga diterimanya. Selama setahun ia memperoleh 10 kg beras setiap bulannya. “Riyen nate angsal hampir setahun, terus wonten satu tahun setengah mboten angsal, sakniki baru angsal male,” ucapnya.

Widarti mengungkapkan kalau bantuan tersebut sangat berarti baginya. Sangat membantu perekonomian dirinya yang harus berjuang sendiri semenjak suaminya meninggal. Diungkapkannya bahwa sehari ia harus masak 1 kg beras untuk kebutuhannya bersama tiga anaknya. “Alhamdulillah angsal bantuan beras ngeten niki, 10 kilo bisa dibuat 10 hari, sehari kulo masak 1 kilo beras damel tigo anak kulo,” kata dia.

H.Triyono kepala desa tebal kecamatan gedangan kabupten sidoarjo merasa sangat senang atas bantuan pemkab sidoarjo kepada warganya. “Saya sebagai kepala desa sangat senang kepada bapak bupati sidoajo, pemerintah kabupaten sidoarjo yang sudah mau turun langsung untuk monitoring bantuan kepada warga saya,” jelas H.Triyono. (adv/yah)



## Wagub Jatim Dorong Lulusan STIDKI Untuk Merdeka Berkarir Songsong Masa Depan Cerah



Wagub Emil saat memberikan selamat kepada wisudawan. (Foto: ist)

**PAMEKASAN, BN** – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elesternur Dardak mendorong para lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam (STIDKI) Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan untuk menyongsong masa depan dengan optimisme, keberanian, dan kreativitas, serta membangun karir secara merdeka dan adaptif berbasis

perkembangan teknologi. Hal ini disampaikan Emil saat memberikan orasi ilmiah dalam acara Wisuda Ketiga STIDKI Al-Hamidy Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang digelar di kampus STIDKI Al-Hamidy, Kabupaten Pamekasan, Kamis (31/7).

Dalam orasinya, Emil menekankan bahwa lulusan bukanlah akhir, me-

lainkan titik awal dalam menentukan arah hidup dan karir secara mandiri. Para lulusan, katanya, harus membebaskan diri dari ketergantungan pada jalur karir konvensional dan mulai membuka peluang baru sesuai dengan potensi dan nilai-nilai yang diyakini.

“Wisuda ini bukan akhir, tapi awal dari kemerdekaan Anda dalam menentukan arah karir. Jangan hanya menunggu peluang, ciptakan peluang. Merdeka berkarir artinya bebas memilih jalan kontribusi yang sesuai dengan potensi dan nilai yang Anda yakini,” ujar Emil.

Ia juga mengingatkan pentingnya membuka diri terhadap berbagai peluang lintas disiplin. Di era teknologi yang berkembang pesat,

kemampuan untuk membaca kebutuhan zaman dan meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan menjadi sangat krusial, bahkan di luar bidang studi asal.

“Latar belakang akademik itu penting, tapi bukan batas. Dunia saat ini menuntut fleksibilitas dan kemauan untuk terus belajar. Maka, tingkatkan skill Anda sesuai dengan kebutuhan zaman, baik itu di bidang teknologi digital, komunikasi massa, konten kreatif, maupun kepemimpinan sosial,” tegasnya.

Emil menjelaskan bahwa era digital telah menciptakan ruang-ruang baru yang sangat potensial, termasuk bagi lulusan komunikasi dan penyiaran Islam. Berdasarkan data APJII tahun 2024, sebanyak 81,79 persen

masyarakat Jawa Timur telah terhubung ke internet. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang sosial kini meluas ke dunia maya, dan para lulusan STIDKI memiliki peluang besar untuk berkontribusi melalui berbagai platform digital. “Penyampaian pesan-pesan keagamaan dan nilai moral hari ini harus visual, naratif, interaktif, dan tetap membawa makna. Anda bisa menjadi komunikator digital, kreator konten inspiratif, jurnalis keagamaan, atau edukator daring. Peran strategis ini bisa dijalankan secara fleksibel dan menjangkau lebih luas berkat teknologi,” terang Emil yang juga mantan Bupati Trenggalek.

Dalam kesempatan itu,

Emil juga memaparkan inisiatif JATIM INFINITY 2025, program Pemprov Jatim untuk memperluas akses internet terutama di wilayah-wilayah blank spot seperti daerah pegunungan. Menurutnya, digitalisasi tidak cukup hanya soal jaringan, tapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam menghasilkan konten yang berkualitas dan berdampak positif.

“Transformasi digital bukan hanya soal konektivitas, tapi juga tentang kapasitas dan konten. STIDKI punya peran penting dalam melahirkan generasi komunikator Islam yang mampu memahami teks agama sekaligus konteks sosial yang terus berubah,” jelasnya.

Menutup orasi ilmiahnya, Emil mengajak para lulusan

untuk terus belajar, menjunjung tinggi etika digital, dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana penyampaian pesan-pesan bernilai yang membangun peradaban.

Ia juga mengapresiasi civitas akademika STIDKI Al-Hamidy atas dedikasinya dalam membimbing mahasiswa menjadi insan yang berilmu, berintegritas, dan siap menjadi agen perubahan.

“Songsong masa depan dengan percaya diri. Merdeka berkarir adalah jalan untuk memberi kontribusi tanpa batas, baik di dunia nyata maupun digital. Anda punya bekal intelektual dan spiritual untuk menjadi pembawa perubahan yang berarti,” pungkas Emil Dardak. (dji)



# Banyuwangi Jadi Laboratorium City Branding, Puluhan Daerah Ikut Belajar

BANYUWANGI, BN – Keberhasilan Banyuwangi membangun city branding dilirik banyak daerah untuk belajar. Mereka mengikuti Executive Education Program (EEP) yang dihelat oleh City Branding Institute, Jumat-Sabtu (1-2/8/2025). “Banyuwangi bisa jadi laboratorium yang bagus bagi daerah yang ingin membangun City Branding dari nol,” Yuswohadi, salah satu penggagas City Branding Institute.

Menurut Yuswohadi, city branding adalah strategi menyeluruh untuk membangun citra dan identitas unik sebuah kota agar dikenal, diminati, dan dipercaya oleh dunia. Menurutnya, Banyuwangi adalah contoh daerah yang berhasil melakukan hal tersebut, sehingga sukses bertransformasi dari kota santet, menjadi daerah yang dikenal luas karena pariwisatanya.

“Banyuwangi sukses bertransformasi. Dari tidak punya (destinasi dan atraksi), kemudian diciptakan hingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini bisa menjadi role model untuk city branding di Indonesia,” kata pakar branding dan marketing tersebut.

Program EEP City Branding ini menghadirkan tokoh-tokoh berpengalaman sebagai mentornya. Seperti Arief Yahya, Menteri Pariwisata RI 2014–2019, Abdullah Azwar Anas, Menpan RB 2022–2024, serta Sigit Pramono, Founder Jazz Gunung.

Pada angkatan pertama, EEP City Branding diikuti oleh 30 peserta. Mereka adalah para pengambil kebijakan dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya KabLampung Selatan, Penajem Utara, Samarinda, dan Kota Serang.



Executive Education Program (EEP) yang dihelat oleh City Branding Institute, Jumat-Sabtu (1-2/8/2025).

Pariwisata 2014–2019, menambahkan city branding menjadi alat strategis untuk memposisikan daerah di tengah persaingan global. “Peningkatan reputasi daerah sebesar 10% mampu mendorong kunjungan wisata hingga 11% dan investasi hingga 2%. Itulah kekuatan city branding,” kata Arief Yahya.

City branding tidak hanya soal promosi wisata, tetapi strategi jangka panjang untuk mengangkat daya saing daerah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdullah Azwar Anas yang dalam sepuluh tahun memimpin Banyuwangi (2010–2020) berhasil menyulapnya dari kota mistik menjadi majestic. “City branding bukan hanya soal promosi, ini soal menyelaraskan seluruh elemen kota, mulai dari alam, budaya, hingga layanan publik, sehingga memberikan pengalaman menyeluruh bagi warga dan pengunjung,” tegas penulis buku Anti Mainstream Marketing tersebut.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sangat mengapresiasi program tersebut. Ipuk juga berterima kasih Banyuwangi dipilih sebagai tuan rumah sekaligus obyek pembelajaran kegiatan ini. “Praktik baik dari kami, silakan diambil. Semoga bermanfaat bagi daerah Bapak/Ibu. Namun kami pun masih jauh dari sempurna, dan masih terus berbenah ke depannya,” kata Ipuk. (Dj/edy)

Selama dua hari, peserta tersebut mengikuti pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning), memanfaatkan template strategi praktis, dan melakukan kunjungan ke destinasi unggulan Banyuwangi untuk mempelajari penerapan nyata city branding. Salah satunya, ke pendopo dan bertemu Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat malam (2/8/2025).

# Kapolresta Banyuwangi Pimpin Apel Jam Pimpinan, Tekankan Kesehatan dan Kinerja Humanis

BANYUWANGI, BN – Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., memimpin Apel Jam Pimpinan di halaman Mapolresta Banyuwangi, Senin (4/8/2025). Dalam arahannya, Kapolresta Banyuwangi menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota atas pelaksanaan pengamalan kegiatan Tour de Banyuwangi Ijen (TDBI) 2025, sebuah ajang balap sepeda internasional yang berlangsung sukses dan aman.

“Terima kasih atas dedikasi dan sinergi dalam mendukung suksesnya event TDBI. Kita tunjukkan bahwa Polresta Banyuwangi siap mengamankan agenda berskala internasional de-



Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Rama Samtama Putra, S.I.K., M.Si., M.H., memimpin Apel Jam Pimpinan di halaman Mapolresta Banyuwangi, Senin (4/8/2025)

ngan baik,” ujar Kapolresta.

Kapolresta Banyuwangi juga menyoroti pelaksanaan penguraian arus lalu lintas di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Kapolresta meminta seluruh personel tetap menjaga kondisi fisik agar dapat menjalankan tugas

dengan optimal. “Kesehatan adalah modal utama dalam bertugas, apalagi di lapangan. Pastikan tubuh fit saat menjalankan pengamanan, terutama di titik-titik padat,” imbuhnya.

Terkait pemeliharaan Harkamtibmas (Pemeliha-

raan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Kapolresta Banyuwangi mengingatkan tentang kegiatan seperti pawai budaya dengan penggunaan sound system berlebihan (sound horeg). Kapolresta meminta agar kegiatan masyarakat tetap dalam batas waktu dan tidak mengganggu kenyamanan publik. “Kegiatan masyarakat harus tetap kita fasilitasi, namun tidak boleh mengganggu ketertiban umum,” tegas Kapolresta.

Apel Jam Pimpinan rutin dilaksanakan sebagai sarana konsolidasi dan evaluasi internal sekaligus penguatan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Banyuwangi.

(Dj/Swd)

# Tingkatkan Layanan, UPPKB Timbang Watu Dodol Ketapang Laksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor

BANYUWANGI, BN – UPPKB TimbangWatu Dodol BPTD, Kementerian Perhubungan Darat melaksanakan rapat koordinasi bersama ASDP Cabang Ketapang Banyuwangi, Satlantas Polresta Banyuwangi, Polsek KP.3 Tanjungwapi, Dishub Banyuwangi, UPT P3 Dishub Provinsi Jatim, dan Wasatpel Pelabuhan Ketapang.

Rapat koordinasi digelar dalam rangka agenda peningkatan layanan di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang serta pembahasan mekanisme pemasangan stiker untuk pemilahan Tonase dibawah 35 ton di MB, sedangkan 35 ton ke atas ke LCM untuk kendaraan angkutan barang yang akan di Pelabuhan Ketapang.

“Terimakasih, kita melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pada hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2025, sekira pukul 10.00 Wib di Kantor UPPKB Watu Dodol Ketapang,” jelas Oni Suryanto, Minggu siang (3/8/2025).

Hasil kesimpulan rapat koordinasi dengan Stakeholder terkait sambungnya, dengan adanya pelaksanaan pemilahan stiker dengan membuat grup WA antar instansi, satu hari dua Sip, menambah bantuan anggota dari ASDP Ketapang, Dishub Banyuwangi, Dishub Provinsi Jatim.

“Tentunya dari Polri – TNI akan mobiling membantu kendaraan masuk di Timbangan, untuk pemasangan stiker di pojok kanan bawah depan, dan tidak mengganggu pandangan sopir/ driver, jadi stikernya ada dua, yang mana kendaraan angkutan barang mau masuk di pelabuhan Ketapang, kapasitas tonase di bawah 35 ton masuk ke MB sedangkan 35 ton keatas masuk di LCM, dan muatan yang cepat busuk prioritas karenavada batas waktu, dan keperluan Tenda sepakat disediakan dari ASDP Ketapang,” ungkapnya.

Sejauh itu tentunya kata dia, “informasi selanjutnya di mulai kegiatan menunggu persetujuan Kapolresta



Rakor Lintas Sektor UPPKB Timbang Watu Dodol Ketapang. (dj)

stiker warna hijau untuk kendaraan barang dibawah 35 ton, sedangkan stiker warna merah sumbu tiga 35 ton keatas, dan dipisahkan jalur kiri dan jalur kanan, yang kekiri masuk di MB dan yang kekanan menuju ke LCM, kami berharap untuk pengemudi, sopir/ driver mulai angkutan orang maupun angkutan barang, patuhi rambu-rambu lalu-lintas, dan ikuti arahan Petugas, jangan sekali-kali ngeblong/nyalip, saling menghargai sesama pengguna jalan”, pungkasnya. (Dj)

Banyuwangi, karena pada saat ini mssih penumpukan antrian kendaraan di depan kantor UPPKB Watu Dodol, sangst padat, jadi kita sepakat melihat atau antisipasi dari ekor kepadatan kendaraan maupun sebaliknya,” jelasnya.

Di akhir Oni Suryanto menambahkan, “sedangkan



Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Triwulan 2 Tahun 2025.

# Pemkot Probolinggo Rapatkan Barisan Jelang HUT ke-80 RI dan Penataan Kota



Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Selasa (29/7/2025), dipimpin oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin. (ist)

PROBOLINGGO, BN – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas sosial menjelang dua agenda besar, yakni peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia dan Hari Jadi Kota Probolinggo. Konsolidasi ini dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Selasa (29/7/2025), yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, dari Command Center. Rapat diikuti jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli, serta dihadiri secara daring oleh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Probolinggo.

Wali Kota Aminuddin menegaskan bahwa kondusifitas wilayah merupakan prasyarat utama untuk menyukseskan seluruh agenda pembangunan, terutama perayaan HUT RI yang akan digelar Agustus mendatang. “Kita ingin peringatan kemerdekaan tahun ini berlangsung aman, tertib, dan meriah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh elemen harus bersinergi agar semangat nasionalisme benar-benar terasa hingga ke lingkungan masyarakat,” ujar Aminuddin.

Pemkot Probolinggo telah membentuk panitia khusus HUT RI dan mengimbau warga untuk mengibarkan bendera Merah Putih serta memasang ornamen kemerdekaan di wilayah masing-masing. Berbagai lomba seperti hias gapura dan lampu jalan turut digelar untuk memeriahkan suasana di tingkat RT/RW.

Selain persiapan HUT RI, Pemkot juga tengah mematangkan agenda penataan kota melalui relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari kawasan Alun-Alun ke sejumlah titik baru. Lokasi relokasi yang disiapkan antara lain GOR A. Yani, Stadion Bayuangga, kawasan Pecinan (Klenteng Tri Dharma), Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL), dan Jalan Suroyo.

“Relokasi ini dimulai tahun 2025 dan akan dilanjutkan ke kawasan Cokroaminoto, Mastrip, dan Wonoasih pada 2026. Kita ingin wajah kota lebih tertib, tapi perubahan ini tentu memerlukan pendekatan persuasif agar tidak menimbulkan konflik,” jelas Aminuddin.

Wali kota juga mengingatkan pentingnya komunikasi efektif antarinstansi dan dengan masyarakat dalam mengawal kebijakan strategis tersebut. Wali Kota Probolinggo turut menggarisbawahi tantangan sosial yang memerlukan penanganan kolaboratif, seperti peredaran minuman keras (miras), narkoba, serta maraknya penggunaan sound system “horeg” yang meresahkan masyarakat. Pemkot telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat untuk mengeluarkan fatwa haram terkait penggunaan sound horeg.

“Kita ingin masyarakat aktif menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing. Semua pihak harus jadi bagian dari solusi agar pembangunan berjalan lancar dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam rapat yang sama, Wakapolresta Probolinggo Kopol Didit Wahyu menyoroti meningkatnya gangguan kamtibmas, khususnya kasus 3C (curas, curat, curanmor). Ia menyebut masih banyak masyarakat lalai dalam menjaga keamanan lingkungan.

“CCTV sudah membantu banyak, tapi tanpa kepedulian warga, hasilnya tidak maksimal. Kami imbau agar siskamling kembali diaktifkan secara nyata sebagai bentuk kearifan lokal dalam menjaga keamanan,” tegasnya.

Sinergi antarsektor yang dibangun melalui forum koordinasi ini menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan memperkuat daya saing Kota Probolinggo di tengah dinamika pembangunan nasional. (SON)

# Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Pemkab Madiun dan Bea Cukai Gelar Operasi Terpadu di Wilayah Kecamatan Balerejo



MADIUN, BN – Dalam rangka menekan dan meminimalisir peredaran rokok ilegal, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Satpol PP menggelar operasi terpadu bersama dengan Bea Cukai, TNI dan POLRI, Rabu (23/

07/2025) di wilayah Kecamatan Balerejo dengan menyisir toko kelontong dan UMKM di Desa Babadan dan Tapelan.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah ( PPHD ) Satpol PP Kabupaten Madiun Danny Yudi Satriawan mengatakan operasi dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim di Desa Tapelan dan Babadan yang melakukan penyisiran di 10 toko kelontong/UMKM di wilayah tersebut. “Disamping melakukan pemeriksaan fisik terhadap bungkus rokok yang dijual, petugas juga melakukan edukasi kepada para pemilik toko agar tidak memperjual belikan rokok ilegal.”

Selain itu, juga mensosialisasikan ciri-ciri rokok ilegal kepada pedagang, “Ini sangat penting agar masyarkat tidak menjadi mata rantai distribusi barang ilegal”, tegasnya.

Lebih lanjut, peredaran rokok ilegal berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan merugikan industri tembakau yang patuh terhadap regulasi.

“Dari hasil operasi yang dilaksanakan, nihil temuan pelanggaran Kami juga menghimbau agar pelaku usaha mematuhi ketentuan perizinan dan peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat,” ucapnya.

Dengan dilaksanakan operasi terpadu tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha di Kabupaten Madiun, karena hasil yang didapat dari menjual rokok ilegal tak sepadan dengan resiko yang ditanggung.

Di tahun anggaran 2025 ini, sampai semester 1 kami sudah melakukan operasi terpadu terhadap rokok ilegal sebanyak 17 kali, dengan sasaran 2 desa ditiap wilayah Kecamatan se-Kabupaten Madiun. “Harapan kami ke depan, pelaku usaha lebih disiplin dan proaktif dalam mentaati peraturan agar situasi tetap kondusif dan nyaman untuk semua pihak.”, pungkasnya. (ADV/bas)



# BPKAD Jombang Gelar Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Triwulan 2 Tahun 2025

JOMBANG, BN – Rekonsiliasi BMD (Barang Milik Daerah) adalah proses pencocokan dan penyelarasan data BMD atau sistem informasi untuk memastikan kesesuaian dan akurasi dan akurasi data aset daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan data antara catatan dan kondisi fisik aset daerah yang akuntabel.

Karena itu dalam upaya meningkatkan akurasi, akuntabilitas, dan integritas data aset daerah, sekaligus mendukung tata kelola keuangan yang lebih transparan dan tertib

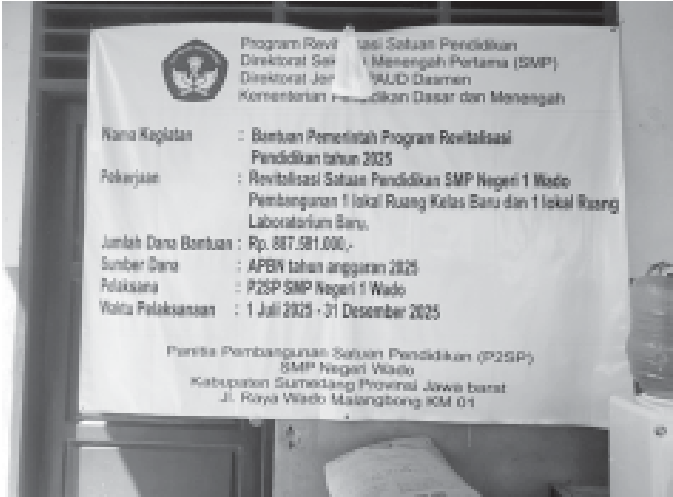
administrasi maka pada tanggal 15 – 23 Juli 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang telah menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Triwulan 2 Tahun 2025 yang gelar secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bertempat di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Jombang.

Dalam kegiatan ini diselelenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali oleh Bidang



# SMPN I Wado Digelontor Proyek Ratusan Juta

❑ Kasek : Semua Dikerjakan P2SP, Kami Hanya Monitor Saja



Papan informasi proyek SMPN I Wado, Kabupaten Sumedang. (Ernawan)

SUMEDANG, BN - Bantuan Pemerintah tentang Program revitalisasi Pendi-

dikan tahun 2025 salah satunya terkucur di SMPN I Wado, Kabupaten Sume-

dang. Sekolah ini memba-  
ngun 1 lokal ruang kelas  
baru dan 1 lokal ruang la-  
boratorium. Anggaran yang  
terkucur melalui Kemen-  
terian Pendidikan Dasar dan  
Menengah pada APBN Ta-  
hun anggaran 2025 sebesar  
Rp.887.581.000,- (Delapan  
ratus delapan puluh tujuh  
juta lima ratus delapan  
puluh satu ribu rupiah ).

Pekerjaan ini berdasar-  
kan programnya dikerjakan  
oleh Panitia Pembangunan  
Satuan Pendidikan (P2 SP)  
SMPN I Wado. Saat ditemui  
dilapangan selaku Ketua  
Kusman dihadapan para  
pekerja mengatakan bahwa  
betul pekerjaan ini diker-

jakan, mudah mudahan  
lancar tidak ada gangguan  
baik dari segi cuaca maupun  
secara administratif berjalan  
tidak ada kendala. Menurut  
Kusman, pekerjaan dilaksa-  
nakan selama 180 hari  
kalender terhitung mulai  
tanggal 1 Juli sampai dengan  
tanggal 31 Desember 2025.

Kepala Sekolah Mene-  
ngah Pertama I Wado saat  
ditemui mengatakan, pe-  
kerjaan ini berdasarkan  
programnya pihaknya tidak  
ikut campur, “Semua sudah  
dikerjakan oleh P2SP, jadi  
kami hanya monitor saja,  
urusan di lapangan itu uru-  
san mereka,” tegasnya.

(Ernawan)

# Pekerjaan Bronjong di Dusun Ciporoan Desa Sidaharja Rampung, Hasil Memuaskan



7.44062645S 108.61129472E  
Jalan Caringin Sidaharja  
Sidaharja  
Kecamatan Pamaron  
Kabupaten Ciamis

Proyek Bronjong di Dusun Ciporoan Desa Sidaharja telah selesai dikerjakan dengan hasil mMemuaskan. (asep sujana)

CIAMIS, BN – Proyek  
pemasangan bronjong di  
Sungai Ciseel yang terletak  
di Dusun Ciporoan, Desa  
Sidaharja, Kecamatan Pama-

rican, Kabupaten Ciamis,  
telah rampung dikerjakan.  
Pekerjaan ini mendapat sam-  
butan positif dari masyara-  
kat setempat.

Proyek tersebut dikerja-  
kan oleh pemborong mile-  
nial Ian Widiyanto Wibowo  
dari Asosiasi Kontraktor In-  
donesia (Askindo) Ciamis.  
Dalam pelaksanaannya,  
pemasangan bronjong dilak-  
ukan dengan sangat baik  
dan presisi, sehingga mem-  
berikan hasil akhir yang  
memuaskan.

Masyarakat Desa Sida-  
harja menyampaikan apre-  
siasi dan terima kasih yang  
sebesar-besarnya kepada  
Balai Besar Wilayah Sungai  
(BBWS) Citanduy, khusus-  
nya kepada PPK OP 3, Ba-  
pak Ijang, atas realisasi pro-  
gram ini.

Dengan adanya proteksi  
berupa bronjong ini, warga

sekitar merasa lebih aman  
dari potensi ancaman long-  
sor dan abrasi tebing Sungai  
Ciseel, terutama saat musim  
hujan tiba. “Ini sangat mem-  
bantu kami. Sekarang kami  
lebih tenang karena tebing  
dan tanggul sungai sudah  
diperkuat,” ujar salah satu  
warga “kasmuri” yang turut  
menyaksikan proses pemas-  
angan bronjong tersebut.

Pekerjaan ini menjadi  
contoh sinergi antara kon-  
traktor muda yang profesio-  
nal dan responsif, dengan  
dukungan pemerintah me-  
lalui BBWS Citanduy dalam  
menjaga keselamatan dan  
kenyamanan masyarakat di  
wilayah rawan bencana.

(Asep Sujana)

# Koperasi Desa Merah Putih Mekarjaya, Produktif

SUMEDANG, BN - Ber-  
dasarkan Instruksi Presiden  
No.9 Tahun 2025 tentang  
percepatan Pembentukan  
Koperasi Desa/Kelurahan  
Merah Putih dan Petunjuk  
Pelaksanaan Menteri Ko-  
perasi Nomor I Tahun 2025  
tentang Pembentukan Ko-  
perasi Desa/Kelurahan  
Merah Putih, salah satunya  
di Desa Mekarjaya Kecam-  
atan Sumedang Utara Kabu-  
paten Sumedang, telah mu-  
lai operasional.

Saat dikonfirmasi Bunyamin selaku pengelola mewakili  
Angga Ketua Koperasi menjelaskan, sebagai langkah awal  
Ketua Koperasi Merah Putih Desa Mekarjaya telah  
memperlihatkan mulai menyajikan kebutuhan anggotanya  
sebelum mendapat bantuan tambahan modal yang bisa  
mencukupi untuk kebutuhan seluruh anggotanya di  
Lingkungan masyarakat Desa Mekarjaya.

Saat ditemui Bidik Nasional (BN) Kepala Desa Me-  
karjaya mengatakan, “Kami melihat bahwa benar benar  
Ketua Koperasi Merah Putih di Desa kami sangat produktif  
dan wujud nyatanya bisa terlihat oleh publik sehingga ka-  
mipun selaku kepala Desa merasa bangga atas tanggung



Tampak Koperasi Desa Merah Putih Mekarjaya menjual berbagai macam Sembako. (ernawan)

dal koperasi sangat ditunggu, “Mudah mudahan dalam  
kurun waktu yang tidak terlalu lama dapat segera bisa  
digulirkan, pasalnya masyarakat sudah menunggu nunggu  
agar masyarakat terhindar dari maraknya rentenir di  
Kabupaten Sumedang,” paparnya.

Ditambahkan Bunyamin, selaku Pengelola Koperasi  
yang dihadapan beberapa orang pengurus mengatakan,  
Pemerintah membentuk Koperasi serentak ini memang  
tujuannya untuk meningkatkan ekomomi masyarakat  
menuju masyarakat adil, makmur dan Sejahtera, “Mudah-  
mudahan saja sebelum tahun 2045 Indonesia sudah bisa  
nyampai di Indonesia emas,” pungkasnya. (Ernawan)

jawaban pengurus yang  
selama ini bisa ditampilkan  
kreativitasnya walaupun  
belum ada tambahan modal  
yang digulirkan. Ini baru  
kerjasama mereka se adanya  
sudah bisa menampilkan  
seperti Pengadaan gas dan  
sembako yang bisa diman-  
faatkan,” kata Kades.

Adapun harapan ketua  
dan rengrengan pengurus,  
lanjut Kades, mengharap-  
kan bantuan dari Pemerin-  
tah untuk memperkuat mo-  
dal koperasi sangat ditunggu, “Mudah mudahan dalam  
kurun waktu yang tidak terlalu lama dapat segera bisa  
digulirkan, pasalnya masyarakat sudah menunggu nunggu  
agar masyarakat terhindar dari maraknya rentenir di  
Kabupaten Sumedang,” paparnya.

Ditambahkan Bunyamin, selaku Pengelola Koperasi  
yang dihadapan beberapa orang pengurus mengatakan,  
Pemerintah membentuk Koperasi serentak ini memang  
tujuannya untuk meningkatkan ekomomi masyarakat  
menuju masyarakat adil, makmur dan Sejahtera, “Mudah-  
mudahan saja sebelum tahun 2045 Indonesia sudah bisa  
nyampai di Indonesia emas,” pungkasnya. (Ernawan)

# Gedung Aula Desa Kertajaya Mangkrak, Kepala Desa Mujiono Tak Respon Saat Dikonfirmasi



Gedung Aula Desa Kertajaya tampak mangkrak. (asep)

CIAMIS, BN - Pembangunan  
gedung aula di Desa Kertajaya,  
Kecamatan Lakbok, Kabupaten  
Ciamis, hingga kini masih  
terbengkalai. Bangunan yang  
diharapkan menjadi pusat kegiatan  
warga desa ini belum juga  
diselesaikan sejak terjadinya  
pergantian kepala desa definitif.

Kondisi bangunan tampak  
mangkrak tanpa ada tanda-tanda  
kelanjutan pekerjaan. Warga  
setempat mulai mempertanyakan  
keseriusan pemerintah desa dalam  
menyelesaikan pembangunan  
tersebut, mengingat gedung aula  
sangat dibutuhkan untuk berbagai  
keperluan masyarakat.

Wartawan BN yang mendatangi  
kantor Desa Kertajaya tidak berhasil  
menemui Kepala Desa Mujiono,  
karena yang bersangkutan tidak ada  
di tempat. Upaya konfirmasi lebih  
lanjut dilakukan melalui pesan  
WhatsApp, namun hingga berita ini  
ditayangkan, tidak ada respons dari  
pihak kepala desa.

Minimnya informasi dan tidak  
adanya kejelasan dari pemerintah  
desa semakin menimbulkan tanda  
tanya besar di kalangan masyarakat.  
Warga berharap pemerintah desa  
segera menyelesaikan pembangunan  
tersebut agar gedung aula bisa  
difungsikan sesuai rencana awal.

(Asep Sujana)

# Penjualan Buku LKS Secara Masif di SDN se-Kabupaten Pekalongan Dilaporkan GNPK RI



Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Pekalongan Raya, Zaenuri. (Dikin)

PEKALONGAN, BN – Dugaan praktik  
penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) kembali  
mencuat di dunia pendidikan dasar. SDN SDN  
di Kabupaten Pekalongan, diduga menjual  
LKS kepada siswa di awal tahun ajaran baru,  
memicu keluhan dan keberatan dari para wali  
murid atas beban biaya tambahan yang diang-  
gap tidak semestinya.

Sejumlah orang tua wali murid menyam-  
paikan bahwa pihak sekolah memberikan  
kewajiban terselubung untuk membeli LKS  
seharga Rp 90.000 per anak, tanpa penjelasan  
resmi. Mereka khawatir jika tidak membeli,  
anak-anak mereka akan tertinggal pelajaran.

“Kami merasa terbebani, apalagi ekonomi  
kami sedang sulit. Buku itu tidak hanya untuk  
satu semester, tapi dua semester. Kalau tidak beli, anak kami ketinggalan. Tapi  
kami juga serba salah kalau mau protes ke guru,” ujar salah satu wali murid yang  
enggan disebutkan namanya, Kamis (31/7/2025).

Para wali murid juga mempertanyakan alasan sekolah masih menjual LKS,  
padahal buku pendamping siswa seharusnya sudah dibiayai oleh Dana BOS.

Menanggapi laporan tersebut, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi  
Republik Indonesia (GNPK RI) Pekalongan Raya, Zaenuri, menyatakan akan segera  
mengklarifikasi pihak sekolah. Jika ditemukan indikasi kesengajaan dan unsur  
pungutan liar, GNPK RI berkomitmen membawa kasus ini ke ranah hukum.

“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi bentuk komersialisasi pend-  
dikan. Jika terbukti, kami tidak akan segan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum.  
Dinas Pendidikan harus turun tangan dan bertindak tegas,” tegas Zaenuri.

Dihubungi secara terpisah beberapa Kepala SDN mengakui adanya jual beli LKS  
di sekolahnya. Namun, ia membantah adanya unsur pemaksaan dalam pembelian  
tersebut. “Sebenarnya saya tidak ingin menjual LKS, tapi ada desakan dari seseorang  
berinisial J melalui Ketua K3S. Karena itu akhirnya kita menyepakati, saya akhirnya  
mengikuti,” ungkap salah satu kepala sekolah saat dikonfirmasi melalui sambungan  
telepon pada tanggal (28/7/2025).

Oknum kepek tersebut menyarankan awak media untuk berklarifikasi ketua  
K3S diwilayah tersebut dan inisial J. (Dikin)

# Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya Mulai Dikerjakan



PANGANDARAN, BN –  
Pemerintah Desa Sukamaju,  
Kecamatan Mangunjaya,  
Kabupaten Pangandaran,  
mulai melaksanakan pem-  
bangunan jalan rabat beton  
di Dusun Sukamaju. Peka-  
jaan ini dimulai pada hari  
Rabu, 16 Juli 2025.

Kepala desa Sukamaju  
Salikin Dp mengharapkan  
kepada masyarakat supaya  
masyarakat menjaga kondu-

sifitas dan harmonis. Panjang jalan yang dibangun mencapai 312 meter dengan lebar 2,5  
meter dan ketebalan 12 cm. Proyek ini menggunakan anggaran dari Dana Desa (DD) tahap  
1 tahun 2025, dengan nilai anggaran lebih dari Rp 134 juta.

Pelaksanaan kegiatan dipimpin langsung oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dusun  
Sukamaju yang dikoordinatori oleh Kadus Sukamaju, Ujang Ahmad Sholeh. Pengerjaan  
melibatkan 18 orang tenaga kerja, dengan 12 orang di antaranya dipekerjakan dalam sistem  
Harian Orang Kerja (HOK).

Kepala Dusun Sukamaju, Ujang Ahmad Sholeh, menyampaikan bahwa pembangunan  
jalan ini merupakan upaya pemerintah desa untuk meningkatkan akses masyarakat,  
khususnya untuk mendukung kegiatan ekonomi warga yang selama ini sangat bergantung  
pada infrastruktur jalan yang memadai.

“Kami berharap dengan selesainya pembangunan jalan ini nanti, aktivitas warga akan  
semakin lancar, baik untuk mengangkut hasil pertanian, menuju sekolah, maupun aktivitas  
harian lainnya,” ujar Ujang Ahmad Sholeh saat dikonfirmasi di lokasi kegiatan.

Pemerintah Desa Sukamaju juga mengajak masyarakat untuk turut mengawasi  
pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya benar-benar sesuai dengan harapan bersama. (Asep  
Sujana)

# Peningkatan Kantor Desa Ganjaresik Dibangun Dengan Dana Banprov Jabar 2024

SUMEDANG, BN - Dana Sa-  
pras tahun 2024 untuk Desa Gan-  
jaresik Kecamatan Wado, Kabu-  
paten Sume-



Kantor Desa Ganjaresik bersih dan megah setelah direnovasi dengan dana Banprov Jabar 2024. (ernawan)

dang, menurut  
H.Abdurahman,  
SPd.I selaku  
Kepala Desa sa-  
at dikonfirmasi  
mengatakan,  
bahwa dana ter-  
sebut dialoka-  
sikan untuk  
pembangunan  
ruang kantor  
bagian atas.  
Menurut Ka-  
des, anggaran dana Bantuan Provinsi ini dialokasikan sebesar  
Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk ruangan  
tersebut. Namun, anggaran sejumlah itu diperkirakan tidak akan  
Cukup. “Kami akan berupaya mencari tambahannya agar pemba-  
ngunan ini bisa selesai. Alhamdulillah sekarang sudah bisa terwujud  
rapi tinggal finishing saja, Insya Allah dalam waktu dekat bangunan  
ini akan selesai dan bisa digunakan untuk operasional,” tutur Kades  
yang telah memimpin Desa Ganjaresik 2 Periode ini dengan disak-  
sikan Sekdes dan perangkat desa lainnya.

Menurut beberapa warga, Alhamdulillah pembangunan di Desa  
Ganjaresik sekarang meningkat baik pembangunan fisik maupun  
non fisik seperti halnya jalan, baik jalan Desa maupun gang gang  
sudah bagus dan Alhamdulillah pula di masyarakat Desa Ganjaresik  
tidak ada yang ketinggalan pendidikan semuanya anak anak muda  
mayoritas berpendidikan baik formal maupun non formal. (Ernawan)



# SMK GAMA KEDUNGADEM

## Cetak Lulusan Berkualitas dan Unggul di Segala Bidang

### PROFIL SEKOLAH



**Selamat Datang Di SMK GAMA Kedungadem**  
Jl. Raya Drokilo Kec. Kedungadem

**Fasilitas Kami:**

- Gedung permanen milik sendiri
- Gedung serbaguna
- Perpustakaan
- UKS
- Mushola
- Toilet
- Laboratorium Komputer dan Bahasa
- Lapangan Olahraga
- Kantin
- Lingkungan hijau dan bersih
- Dll

BOJONEGORO, BN - Kecamatan Kedungadem adalah kecamatan strategis dan cukup ramai di berbagai bidang. Ini wajar saja karena Kedungadem sekarang jadi jalan poros utama menuju Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri serta Malang. Para pengusaha angkutan dari arah Jawa Tengah lebih suka melalui jalur ini karena jarak tempuhnya lebih dekat, jika dibanding jalur Pantai Utara – Babat dan jalan tol Solo – Surabaya.

Di kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten Lamongan ini juga penduduknya semakin padat, pertumbuhan ekonomi cukup pesat, banyak bermunculan tempat-tempat perdagangan dan Pendidikan. Di kecamatan ini lah berdiri megah sebuah lembaga pendidikan, tepatnya di poros jalan raya Drokilo - Kedungadem yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) GAMA berdiri tahun 2009. SMK GAMA telah meluluskan ribuan murid, putra putri anak bangsa le-

wat kejuruan, Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) serta Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO). Banyak para orang tua di wilayah kecamatan Kedungadem, Kepohbaru bahkan, kecamatan Sukorame kabupaten Lamongan yang perbatasan dengan kabupaten Bojonegoro, memilih menyekolahkan anaknya di SMK GAMA. Sebab SMK ini berkualitas dan unggul di segala bidang Pendidikan, karena SMK GAMA mempunyai inovasi kegiatan

ekstrakurikuler yang memadai serta program lainnya. Seperti penguasaan teknologi tinggi (AITI), juga program lainnya. Humas SMK GAMA, Fitriani Indarsih, S.Pd. saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, ia berharap kedepanya SMK GAMA lebih maju di segala, bidang tidak kalah dengan SMK yang di kota dan SMK GAMA juga selalu terpilih ikut paskibraka diseleksi tingkat kecamatan, “Karena kami mengajarkan, kedisi-

plinan yang tinggi dan berakhlak dan kepribadian yang unggul,” ujar Fitriani. Di tempat yang sama kepala SMK GAMA Sri Agustin, S Kom mengatakan, “Kami selalu menjaga kualitas pendidikan. menuju Indonesia emas untuk mendidik anak bangsa yang lebih cerdas,” tandasnya. Sementara Bapak Haji Lamidi Jimat,SH, selaku ketua pembina sekaligus pendiri Yayasan Pendidikan ARDILA, SMK GAMA juga MTs GAMA Boarding School yang berkedudukan di jalan Raya Drokilo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro menambahkan, “Saya berharap SMK GAMA dan MTs GAMA ke depan menjadi naungan tempat anak bangsa yang bermutu dan berkualitas, berbasis pendidikan bermartabat menjadi wadah anak anak bangsa yang lebih berkualitas mempunyai dasar kekuatan moralitas, beraklak-tul karimah,” pungkas Haji Lamidi.

(priyanto/adv)



Gedung SMK GAMA Kedungadem di Jalan Raya Drokilo – Kedungadem tampak megah. (pri)

# Proyek Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo On Progres

## Kadis DLHK Bahrul Amig Optimis Desember Mendatang Sudah Bisa Dinikmati Masyarakat



Progres revitalisasi Alun-alun Sidoarjo. (Teddy Syah)

SIDOARJO, BN - Hingga akhir Juli ini, Progres revitalisasi Alun-alun Sidoarjo pengerjaan-

nya sudah capai 33,33 persen. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Sidoarjo, Bahrul Amig mengatakan, waktu pelaksanaan proyek ditarget selama 210 hari kalender. Menurutnya, dari jumlah tersebut, 70 hari sudah terlewati dan tersisa 140 hari ke depan. “Dari waktu yang tersisa harus bisa menyelesaikan 66,67 persen kekurangan,” ucapnya, Selasa, (29/7) siang.

Amig mengaku optimis proyek rampung tepat waktu. Dia ingin, Desember mendatang, Alun-Alun Sidoarjo sudah bisa dinikmati masyarakat.

“Wajah alun-alun bakal tampil lebih segar dan menjadi ikon baru kebanggaan Sidoarjo, semoga menjadi kado akhir tahun bagi warga,” ujarnya.

Setiap hari, tim pelaksana melaporkan progres secara rutin. Pihaknya juga terus memantau langsung perkembangan di lapangan. Sejauh ini, tidak ditemukan kendala teknis dalam pelaksanaan. Namun, koordinasi dengan pihak luar seperti PLN dan Telkom masih terus dijalankan. “Nantinya,

semua kabel jaringan di kawasan alun-alun akan ditanam, tidak boleh ada lagi kabel udara yang semrawut,” tegasnya.

Terkait penebangan pohon, Amig menjelaskan, alun-alun bukan kawasan hutan kota. Melainkan RTH publik yang sebisa mungkin didesain untuk kenyamanan masyarakat.

“Sebagai orang lingkungan, saya pun merasa sayang, namun penataan ulang jauh lebih penting untuk keberlanjutan jangka panjang,” jelasnya.

“Tanaman pengganti



Kondisi Alun-alun Sidoarjo. (Teddy Syah)

nanti lebih estetik dan mudah dirawat, selain itu, kami juga tetap memperhatikan aspek kerin-

dangan dan fungsi ekologi di tengah kota,” pungkasnya.

(Teddy Syah)

# Tiga Terdakwa Langgar Keimigrasian, Jaksa Galih Rakasiwi,SH : Masih Diperdalam Melalui Persidangan



Tiga terdakwa dari kiri Bakhat Bahadur BK, Satyam Kumar dan Lia Taniati duduk di hadapan majelis hakim PN Surabaya.

SURABAYA, BN- Jaksa Penuntut Umum, Galih Rakasiwi, SH (Kejari Surabaya), bahwa surat dakwaan terhadap tiga orang terdakwa yang diduga melanggar keimigrasian di Surabaya masih perlu dilakukan pemeriksaan dalam persidangan dengan menghadirkan belasan orang saksi terkait dugaan penyelundupan tenaga kerja dari India.

Jaksa Galih Rakasiwi, SH mengatakan antara lain, meskipun perbuatan tiga orang terdakwa yaitu Satyam Kumar, Lia Taniati dan Bakhat Bahadur BK tergolong dakwaannya melanggar Pasal 120 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian RI, yang kira-kira perbuatannya mengarah kepada penyelundupan manusia asing. “Tapi masih perlu diperdalam fakta-faktanya melalui persidangan ini dengan menghadirkan banyak saksi fakta,” papar Jaksa Galih.

Dalam sidang pekan lalu, Jaksa Galih berhasil

tersangka pada tahap penyidikan pihak kantor Imigrasi Kota Surabaya. “Saya ini salah apa. Saya dan perusahaan saya tidak mengurus masuknya orang-orang Nepal itu, cuma saya berusaha membantu menampung mereka. Dan tidak ada biaya atau uang apapun yang saya tarik dari mereka. Ada yang janggal di perkara ini. Padahal sudah didatangi oleh sponsorship saya,” ungkap Satyam usai sidang pada Wartawan BIDIK NASIONAL Senin kemarin.

“Agenda sidang Senin minggu depan masih menghadirkan para saksi fakta. Sekarang masih pemeriksaan dalam persidangan, jadi belum bisa kami simpulkan ketiga terdakwa ini terlibat dalam penyelundupan manusia. Masih dibutuhkan keterangan saksi-saksi lain,” jelas Galih pada Wartawan BIDIK NASIONAL usai sidang.

Secara terpisah, kuasa hukum para terdakwa, Sugiyanto, SH, MH, dkk saat ditanya terkait perannya Satyam Kumar mengatakan, setahu pihaknya dan berdasarkan fakta, bahwa Satyam tidak berperan sebagai apapun karena dia diminta tolong oleh temannya di Nepal, India untuk membantu menerima 17 orang dengan visa kunjungan wisata itu bila sudah tiba di Indonesia. “Artinya kita belum tahu pasti apa perannya mereka. Dan tidak ada kaitan

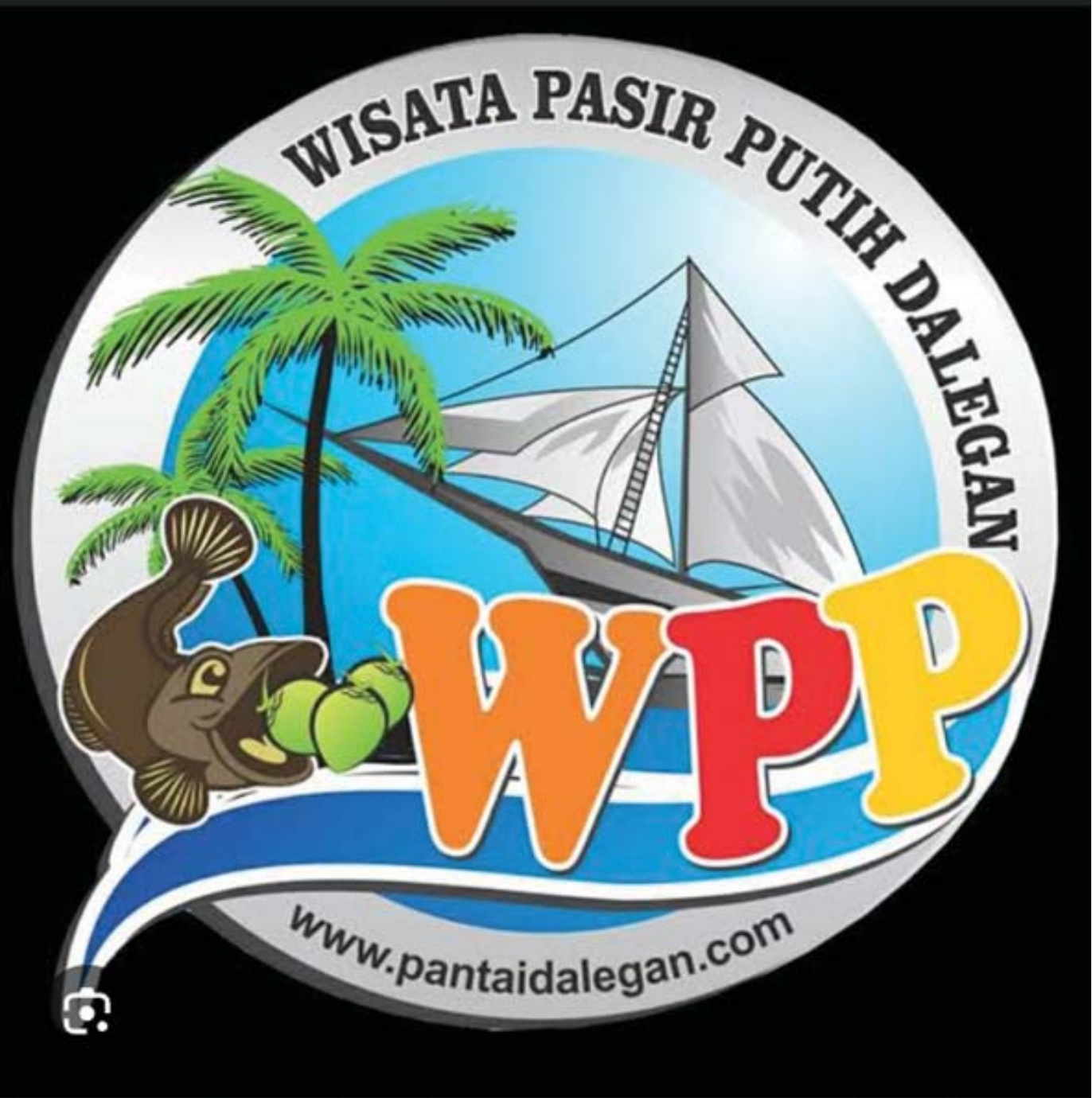
apapun perusahaan pak Satyam dengan proses KITAS (Keterangan Ijin Tinggal Sementara) Imigrasi bagi para turis Nepal itu,” jelas Sugiyanto ber Kantor di Sidoarjo itu.

Keterangan saksi 7 orang dari 17 turis Nepal itu mengakui, bahwa mereka tidak bertujuan mencari pekerjaan di Indonesia karena mereka memiliki visa kunjungan wisata saja

dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Spanyol. Saksi Irma yang menguruskannya visa mereka mengungkapkan, bahwa mereka sedang diuruskan visanya ke Spanyol, bukan tujuan

akhirnya di Indonesia. “Biaya per visa di Spanyol sebesar Rp 5 juta, sudah terurus 7 orang, 1 orang diantaranya sudah berangkat duluan,” jelas Irma.

(Akariem)







# INFO DPRD KOTA BANDUNG

## Komisi III DPRD Kota Bandung Sosialisasikan Perwal RDTR 2024-2044

**BANDUNG, BN - Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menjadi narasumber Sosialisasi Perwal Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung 2024-2044, di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin, 28 Juli 2025.**

**HADIR** menjadi narasumber sosialisasi Perwal ini Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung H. Sutaya, S.H., M.H., dan Rendiana Awangga. Acara ini dibuka Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen, dan dihadiri Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang Bambang Suhari, serta perwakilan OPD dan aparatur kewilayahan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung H. Sutaya menuturkan, sosialisasi ini adalah momentum yang baik setelah hadirnya Perwal RDTR ini. Penekanan sosialisasi ini tentang aparatur yang terbatas untuk menjangkau masyarakat. Ia pun menyampaikan penghormatannya kepada camat dan lurah yang ikut hadir dalam acara itu, baik secara langsung maupun daring.

“Kami harapkan seluruh stakeholder bisa ikut sosialisasi karena tanpa bantuan lurah dan camat, sulit untuk menjangkau publik secara luas. Kami pun masih mendapatkan keluhan dari masyarakat yang tidak memahami peraturan ini. Maka dibutuhkan bantuan

sosialisasi secara kolaboratif. Kami harapkan bantuan kewilayahan untuk menyosialisasikannya,” tuturnya. Sosialisasi ini ia nilai sebagai awal yang baik, karena Bandung adalah kota dengan penduduk padat. Tentunya permasalahan yang ada di dalamnya pun cukup kompleks, terutama di tengah permukiman.

Seperti halnya banjir, yang diharapkan melalui Perwal ini masalah tersebut segera terselesaikan. Proses penyusunan RDTR ini juga telah terhubung dengan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS/ Online Single Submission). Bagi Sutaya mengatakan, sistem ini sangat menggembarakan terutama bagi pengusaha karena ada kepastian hukum dalam menjalankan usahanya nanti.

“Maka kami optimistis Perwal ini disosialisasikan karena ini kunci utama bagi Kota Bandung ini lebih maju ke depan. Kami di DPRD selalu siap untuk membantu dalam hal fokus anggaran,” katanya.

**KONSISTENSI**  
Masih di tempat yang



*Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung menjadi narasumber Sosialisasi Perwal Nomor 29 Tahun 2024, di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin, 28 Juli 2025. (Tofan/Humpro DPRD Kota Bandung).*

sama, Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menilai Perwal ini sudah menjadi milik warga Kota Bandung. Sehingga, keterlibatan seluruh elemen akan semakin melengkapi tegaknya aturan ini di lapangan.

Perwal RDTR ini juga selaras dengan keberadaan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035.

“Setelah tiga periode saya di DPRD, ini merupakan Perda terlama yang dibahas. Sampai ada pergantian ang-

gota Pansus. Ini menunjukkan bahwa Perda ini tidak bisa dibahas sembarang, tidak bisa dianggap ringan dan mudah. Ketika Perda dan Perwal ini disusun, akan mengikat lintas generasi hingga 2044. Ini menjadi warisan bagi masyarakat Kota Bandung yang akan tinggal dan hidup di masa mendatang,” tutur pria yang biasa disapa Kang Awang itu.

Yang menjadi catatan dari DPRD, ia melanjutkan, bahwa dewan menekankan pentingnya konsistensi Pemkot beserta OPD terkait dalam menjalankan regulasi ini. Kompleksitas kota de-

ngan penduduk hampir 2.6 juta ini tidak sebanding dengan luas lahan yang tersedia. Berbeda dengan kota besar lain seperti Surabaya yang lebih tertata karena memiliki luas lahan lebih dari dua kali lipat Kota Bandung.

Persoalan tata ruang ini erat dengan penyelesaian masalah macet, banjir, kawasan kumuh, dan masalah mendasar lainnya. Dengan lahan terbatas akan sedikit sulit untuk Kota Bandung melakukan revitalisasi dan penataan. Maka konsistensi implementasi Perda dan Perwal RDTR akan menjadi

semangat untuk membangun kota yang lebih nyaman untuk ditinggali warga Bandung.

Kang Awang menambahkan, Kota Bandung memiliki banyak peraturan bagus. Tetapi sebagai apapun peraturan tidak akan dirasakan manfaatnya jika tidak dilaksanakan secara konsisten. Selama ini, banyak sekali peraturan yang dilanggar karena kurangnya pengawasan.

“Maka kami mendorong teman-teman OPD, juga di Satpol PP dan Dicipta Bintar agar pengawasan ini lebih konsisten dan melibatkan lintas sektoral, baik di tingkat kewilayahan dan masyarakat, sehingga pelanggaran bisa diantisipasi dengan melakukan tindakan preventif. Tidak mungkin bangunan didirikan dalam satu malam. Jadi jangan sampai sudah terbangun baru rame. Saya ingin hal itu bisa dihindari. Bandung tidak boleh acak-acakan lagi,” tuturnya.

Tim Penyusun RDTR Kota Bandung Tahun 2024-2044 Retno Dwi Surjaningsih menuturkan, keterlibatan DPRD dalam penyusunan Perwal ini bukan hal kecil. Yang pertama, ia berani memastikan bahwa RDTR ini disusun dengan memastikan substansinya selaras dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042. Sebab, Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang RDTR Kota Bandung Tahun 2015-2035 ini harus sinkron dengan Perda RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042.

“Perda ini hasil kerja sama Pemkot dengan DPRD. Prosesnya juga panjang karena melibatkan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, DPRD, hingga masyarakat. Peraturan wali kota ini juga melakukan konsultasi publik. Meski hanya melalui Perwal, tetapi dalam prosesnya tim tetap berkonsultasi dengan melibatkan DPRD,” ujarnya.

Dalam rancangannya, RDTR Kota Bandung ini akan mengatur banyak hal, dari mulai merancang zonasi wilayah, jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan jalan, jaringan sampah, hingga jaringan transportasi.

Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen mengatakan, RDTR ini dibentuk untuk merancang pembangunan Kota Bandung. “Harusnya ini lurah dan camat sangat mengerti rancangan ini, karena RDTR ini adalah induk dari perencanaan di kota ini,” ujarnya.

(ADV/San)

## Bupati Pelalawan Pimpin Apel Siaga Karhutla Tahun 2025

**PELALAWAN, BN -** Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar Apel Siaga Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Pelalawan, Kamis (24/7/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan H. Zukri.

Apel siaga ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para kepala OPD, Satpol PP, BPBD, Damkar, Manggala Agni, pimpinan perusahaan, para camat, serta unsur TNI dan Polri.

Dalam amanatnya, Bupati H. Zukri menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terlebih di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pelalawan.

“Masyarakat berharap kepada kita semua agar Kabupaten Pelalawan terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, mari kita awali segala upaya ini dengan memperbanyak doa kepada Allah SWT, memohon agar kita semua dilindungi dan diturunkan hujan guna membantu pencegahan dan penanganan karhutla,” ujar Bupati.

Bupati meminta seluruh tim pencegahan dan penanga-



*Bupati Pelalawan H. Zukri saat memimpin apel Siaga Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2025 yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati, Kamis (24/7/2025)/ Foto: ist*



dalam kondisi aman, meningkatkan patroli siaga, dan memastikan seluruh peralatan pemadaman siap digunakan. “Kondisi cuaca panas saat ini sangat rawan. Sedikit saja ada pemantik api, bisa langsung terjadi kebakaran. Karena itu patroli harus diperketat dan peralatan harus dalam kondisi stand by,” tegasnya.

Bupati juga mengajak semua pihak mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Damkar, Manggala Agni, dan seluruh elemen perusahaan untuk bersatu dan tidak saling menyalahkan apabila terjadi kejadian di lapangan.

“Memang ini pekerjaan berat, tapi ini tugas yang mulia. Ini untuk kepentingan masyarakat. Jika Karhutla tidak bisa kita atasi, dampaknya sangat luas, bukan hanya pada lingkungan, tapi juga kesehatan, sosial, dan ekonomi Masyarakat,” tutup Bupati. (js)

nan Karhutla untuk memperkuat koordinasi dan kekompakan di lapangan. Ia menugaskan Kepala BPBD untuk membagi zona pengawasan dan membentuk grup koordinasi sebagai langkah strategis dalam mempercepat respon di setiap potensi kejadian.

Bupati Zukri juga menekankan pentingnya peran aktif perusahaan dalam meminimalisir risiko karhutla. Ia meminta setiap perusahaan memastikan kawasan sekelilingnya

## Serahkan SK 23 CPNS dan 84 PPPK, Bupati Zukri Berpesan ; Bekerjalah Dengan Tulus dan Ikhlas

**PELALAWAN, BN -** Bupati Pelalawan H. Zukri langsung menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi tahun 2024 dan Surat Keputusan (SK) Perubahan Unit Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022. Acara bertempat di Auditorium kantor Bupati Pelalawan.

Penyerahan SK diterima langsung oleh sebanyak 23 orang lulusan CPNS dan 84 orang SK perubahan penempatan tenaga P3K fungsional Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Jum,at 4/7/2025. Kepala Badan Kepega-



*Bupati Pelalawan H. Zukri saat menyerahkan SK CPNS Formasi tahun 2024 dan SK Perubahan Unit PPPK Jabatan Fungsional Guru Formasi Tahun 2022 di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan, Jum,at 4/7/2025. (Foto: ist)*

wiaan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Darlis SP, M.Si, mengatakan, penetapan kebutuhan PNS di lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran dengan berdasarkan Hukum : KEPMENPAN-RB Nomor 293 Tahun 2024 dan Surat



MENPAN-RB Nomor B/2514/M.SM.01.00/2023 Perihal Perubahan unit Penempatan PPPK Guru Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022.

Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 59 poin ayat (2) bahwa pelamar

pengadaan PNS harus membuat surat pernyataan. Dimana si pelamar harus bersedia mengabdikan pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat nya.

Sementara Bupati Pelalawan H. Zukri, mengucapkan selamat atas terpilihnya Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. “Kalian adalah orang-orang hebat terpilih untuk bergabung di pemerintahan kab Pelalawan dan saya berharap dapat memajukan daerah ini,” ucapnya.

Bupati Pelalawan juga ■ **Bersambung ke hal.10 kol.5**

## Progress 85 Persen, Proyek Penataan Lapangan Umum Sepak Bola Penebel Ditargetkan Selesai Agustus



*Lokasi lapangan umum olah raga Penebel paving jogging track sudah hampir selesai dan juga planter box sudah tertanam tanaman kacang serta lampu penerang taman,” Sabtu, (26/07/2025. (Awi)*

**BALI, BN -** Lapangan umum sepak bola Penebel yang dulunya tidak terurus dan tidak terawat banyak tumbuh tanaman liar di sekitar lapangan serta pohon besar, muncul ide dan gagasan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya untuk melakukan penataan lapangan Penebel, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) kabupaten Tabanan.

Untuk menata dan memperindah lapangan umum Penebel seluas 1.4 hektar pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabanan mengucurkan anggaran sebesar 2 milyar lebih yang bersumber dari dana APBD daerah.

Dari pantauan awak media BN di lapangan pekerjaan sudah berjalan selama 4 bulan lebih, pemasangan beton U Ditch saluran resapan air yang terpasang melintang di bawah lapangan sudah selesai dikerjakan dan di timbun kembali dengan tanah, Sabtu (26/07/2025).

Proyek pekerjaan penataan lapangan umum sepak bola Penebel SPMK dimulai pekerjaan 19 April 2025, dengan masa pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalender, dikerjakan oleh CV. HERWINA KARYA dengan nilai surat pesanan Rp. 2.191.011.000,00 dari nilai pagu anggaran sebesar Rp. 2.250.000.000,00 bersumber dari dana APBD Kabupaten Tabanan tahun 2025, progress pekerjaan saat ini kurang lebih 85 persen dan diperkirakan akan selesai pada 11 Agustus sesuai dengan kontrak kerja dengan masa pemeliharaan 1 tahun.

Selain itu, pelaksana lapangan Wayan Sudarsana juga menyampaikan selama dalam proses melaksanakan pekerjaan sempat mendapat kendala faktor cuaca hujan sehingga membuat tanah berlumpur dan sulit untuk melakukan proses pekerjaan pembersihan akar pohon yang tertanam, serta pemindahan tiang kabel pln dan provider,” terangnya.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRPKP kabupaten Tabanan, Made Adnyana saat dikonfirmasi awak media menyampaikan secara mayor pekerjaan proyek penataan lapangan umum Penebel meliputi jogging track, planter box, penataan parkir, perbaikan drainase.

“Proyek penataan lapangan umum sepak bola Penebel itu adalah ide dan gagasan dari Bapak Bupati, bahwa kedepan akan dibangun lapangan sarana fasilitas tempat olah raga gratis disetiap kecamatan,” terang Adnyana.

Diketahui bahwa pekerjaan penataan lapangan umum sepak bola Penebel sesuai dengan SPMK dimulai pekerjaan 19 April 2025, masa pelaksanaan pekerjaan 120 hari kalender, berakhir masa kontrak pekerjaan 11 Agustus 2025, dengan masa pemeliharaan 1 tahun.

“Dengan jumlah anggaran segitu tahun ini hanya bisa melakukan penataan jogging track, penataan parkir, perbaikan drainase, serta planter box dengan penanaman cabe buya dan kacang. Sedangkan untuk pekerjaan tribun penonton, penataan rumput lapangan tidak masuk dalam pekerjaan tahun ini,” imbuh Adnyana.

Pekerjaan fisik tahun ini di bidang cipta karya meliputi Penataan Parkir RSUD Tabanan Ex Dinas Pariwisata Tahap II, Penataan Halaman Mall Pelayanan Publik, Rehab Rumah Dinas Wanasara, Penataan Lapangan Umum Penebel, Penataan Tapal Batas Kabupaten Tabanan – Badung Tahap II, Penataan Tapal Batas Tabanan – Jembrana Tahap II, Pembangunan Taman Tugu Singasana Tahap II, Penataan Taman Perjuangan Singasana Tahao II, Pembangunan Skate Park Lapangan Umum Kediri, Pembangunan Senderan Tempat Pembuangan Sampah di Banjar Sarwa Genep, sedangkan n Pembangunan SPAM Desa Kesiut, dan Peningkatan SPAM Desa Gadung Sari sudah PHO selesai pekerjaan. (Awi)



# Sukses, Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM II) Tim LARAP DAS Cipunagara



Tim LARAP DAS Cipunagara Kementerian PUPR, Ditjen Sumberdaya Air, (BBWS) Citarum saat Pertemuan Konsultasi Masyarakat II (PKM II) di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang. (M Tohir)

SUBANG, BN – Kamis 31 Juli 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, menggelar Pertemuan Konsultasi Masyarakat II (PKM II) di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.

Kegiatan ini mengkonfirmasi kegiatan pelaksanaan LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) dalam program Engineering Service for Cipungara River Basin Management Sub Project di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini tim hanya dalam 6 minggu harus sudah mendatangi lebih 1000 Warga Terdampak Proyek WTP).

Acara ini dihadiri oleh Tim LARAP lengkap, juga jajaran Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, PU kab Subang, PJT, para camat dan kepala desa wilayah proyek, tokoh masyarakat, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.

Tidak dilupakan juga Mr Kim dan jajaran konsultan DMEC Korea. Tujuan utama kegiatan adalah menyampaikan hasil kajian awal, rencana teknis, serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Ketua Tim LARAP, Ari Hariadi, memaparkan rencana



kepala desa kec, Legon kulon dengan media bidik Nasional di acara PKM II.

pembangunan tanggul pengendali banjir di DAS Cipunagara yang mencakup 22 desa mulai dari Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara hingga Desa Sukatani, Kecamatan Compreng, dengan panjang penanganan hampir 137 km.

Rencana pembangunan meliputi: Pembangunan tanggul di sepanjang sungai untuk menahan luapan air, Sistem Peringatan Dini Banjir (Flood Forecasting Warning System/ FFWS), Sistem Pengelolaan Banjir Terpadu berbasis prediksi dan antisipasi dini atau Early Warning Sistem, Kolam retensi untuk menampung limpasan air sementara.

Berdasarkan pendataan awal Tim LARAP, proyek ini akan bersinggungan dengan: 1.637 titik aset dan utilitas yang tersebar di sepanjang jalur tanggul, dari Desa Patimban hingga Bojonegara. 1.148 Kepala Keluarga (KK) terdampak yang tersebar di Kecamatan Pusakanegara, Legon Kulon, Pamanukan, Pusaka Jaya, dan Tambakdahan.

Tanggul yang akan dibangun berfungsi sebagai dinding pengaman, baik alami maupun buatan, untuk mencegah banjir merendam daerah sekitar sungai. Infrastruktur ini diharapkan mampu mengendalikan aliran air dan meminimalkan kerugian akibat banjir yang selama ini kerap melanda wilayah hilir DAS Cipunagara.

Lanjut Ari Hariyadi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting, terutama dalam memberikan masukan dan memastikan proses pembebasan lahan berjalan sesuai ketentuan, adil, dan transparan. PKM II juga menjadi forum diskusi terbuka untuk menghindari potensi konflik sekaligus memastikan manfaat proyek dapat dirasakan secara optimal.

Dengan terlaksananya PKM II ini, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan, manfaat, dan tahapan pelaksanaan proyek pengendalian banjir DAS Cipunagara. “Harapannya, pembangunan dapat berjalan lancar demi keselamatan dan kesejahteraan Masyarakat,” ungkapnya. (M.Tohir)

# Bupati Asahan Dampingi Plt Dirjen Perkebunan Kementan RI Tinjau Lokasi Cetak Sawah di Desa Silo Bonto



Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar bersama Plt Dirjen Perkebunan Kementan RI, Dr. Abdul Roni, saat meninjau lokasi cetak sawah di Desa Silo Bonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. (ist)

ASAHAN, BN - Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), Dr. Abdul Roni Angkat saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi cetak sawah di Desa Silo Bonto, Kec Silau

Laut, Kab Asahan Senin (28/07/2025). Kegiatan ini juga turut di hadiri oleh Wakil Bupati Asahan, Dandim 0208/Asahan, perwakilan Danlanal TBA, OPD terkait, Camat Silau Laut, serta Kepala Desa Silau Bonto. Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI, Dr. Abdul Roni Angkat disela sela peninjauannya menyam-

paikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung program cetak sawah di Kabupaten Asahan. Ia meminta kepada Kepala Desa Silo Bonto dan Camat Silau Laut dan OPD terkait dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada agar proses pengerjaan tidak menemui kendala kedepannya.

“Kita harap cetak sawah ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Permasalahan yang muncul di lapangan harus segera diselesaikan. Kami siap membantu Pemerintah Kabupaten Asahan dan meminta Forkopimda untuk turut serta mendukung kelancaran program ini,” ujarnya.

Dikesempatan ini juga, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih

kepada Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI dan tim yang telah hadir dan meninjau langsung progres cetak sawah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan RI beserta tim atas kunjungan ini. Kami berharap beliau dapat terus mendukung dan membantu program cetak sawah yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Asahan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, beliau juga menjelaskan bahwa lahan yang direncanakan akan dicetak menjadi sawah ini seluas 1.200 hektare, yang merupakan milik masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau Kepala Desa untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga agar program ini berjalan lancar. (T.P)

# Meriah dan Penuh Makna, Puncak HAN OKI 2025

OKI, BN - Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) gelar senam bersama anak-anak dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA/SMK se-Kecamatan Kayuagung yang ikut berpartisipasi. Terdapat stand pelayanan publik dari berbagai instansi turut hadir memberikan edukasi dan pelayanan langsung kepada anak-anak serta masyarakat.

“Hari Anak adalah momen yang sangat istimewa, karena kita semua hadir untuk memberikan perhatian dan cinta kepada generasi masa depan bangsa yang sehat, ceria serta berprestasi,” tegas Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki pada gelaran Hari Anak Nasional di Halaman Gedung Kesenian Kayuagung, Selasa(05/08/25).

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan pembagian susu gratis dan nutrisi cegah stunting berupa telur dan beras kepada anak-anak, serta penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA). “Pemerintah turut hadir dalam menuntaskan anak-anak yang beresiko stunting, kami hadir memberikan nutrisi berupa susu, telur serta beras. Dan juga kita bagikan identitas anak berupa Kartu Identitas Anak (KIA) kepada mereka,” ujarnya.

Ketua TP PKK Kabupaten OKI, Ny. Hj. Ike Meilina Muchendi, yang turut mendampingi kegiatan ini menyampaikan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam



Suasana acara Puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-41 Tahun 2025 Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). (ist)

pembagian hadiah untuk para pemenang lomba edukatif dan kreatif anak-anak. Lomba-lomba ini meliputi Lomba Mewarnai untuk tingkat TK, Lomba Melukis (SD), Lomba Baca Puisi (SMP), serta Lomba Fashion dari Limbah Daur Ulang (SMA/SMK).

“Kami sangat bangga dan mengapresiasi anak-anak yang telah berprestasi, yang telah mengikuti lomba kreatif serta edukatif. Kami ucapkan selamat dan teruslah berkarya serta belajar,” ungkap Ike.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten OKI, Hj. Arianti menyampaikan bahwa peringatan HAN ke-41 tahun ini mengusung semangat kolaboratif. “Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa anak adalah subjek yang harus dilibatkan dalam setiap kebijakan dan program. Melalui kegiatan ini, kami dorong anak-anak untuk aktif, sehat, kreatif, dan berdaya,” ungkapnya.

(Nurlis)

# Warga Beltim Wajib Kibarkan Merah Putih Satu Bulan Penuh



Bupati Beltim, Kamarudin Muten saat membagikan bendera merah putih ke warga. (diskominfobeltim)

MANGGAR, BN – Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mewajibkan seluruh warga untuk memasang atau mengibarkan bendera merah putih selama satu bulan penuh, terhitung sejak 1 Agustus hingga 31 Agustus 2025. Pengibaran bendera ini dilakukan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI. Hal ini juga menggugah semangat nasionalisme dan gotong royong masyarakat.

Untuk memberikan contoh dan tauladan, Pemkab Beltim melaksanakan Pembagian dan Pemasangan Bendera

Merah Putih bersama Bupati dan Forkopimda Beltim di Bundaran Depan Kantor Bupati Beltim, Jum’at (1/8/25) Pagi. Bupati Beltim, Kamarudin Muten dan Wakil Bupati Khairil Anwar beserta Forkopimda memasang bendera di bundaran depan Kantor Bupati, yang diikuti pemasangan bendera di seluruh Kantor Pemerintah secara serentak.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Beltim, Evi Nardi mengatakan pengibaran Bendera Merah Putih di Kabupaten Beltim sebagai tindaklanjut dari surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.10.1.1/3823/SJ tanggal 15 Juli 2025. Surat ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

“Pemasangan dan pengibaran bendera ini untuk menggugah rasa cinta tanah air serta meningkatkan semangat nasionalisme dan gotong royong bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka menyambut HUT ke 80 RI Tahun 2025,” kata Evi.

Dalam surat edarn tersebut juga ditegaskan bukan hanya kewajiban bagi warga untuk mengibarkan bendera. Kesbangpol Beltim juga wajib membagikan bendera bagi warga yang belum mempunyai bendera.

Tidak tanggung-tanggung Kesbangpol Beltim menyiapkan 10.000 Bendera Merah Putih untuk dibagikan ke setiap kecamatan dan desa. Pembagian ini juga untuk mendukung pencanangan Gerakan 10.000.000 Bendera Merah Putih se Indonesia.

“Pembagian ini dilakukan jika ada masyarakat yang tidak ada bendera bisa minta di kecamatan atau setiap desa, karena pemerintah sudah meminta pastisipasi bantuan bendera dari pihak swasta,” ungkap Evi. (diskominfobeltim/as)

# Bupati Ingatkan Guru Deteksi Dini Antisipasi Bullying



Bupati Beltim, Kamarudin Muten saat mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Beltim. (diskominfobeltim).

MANGGAR, BN –Bupati Belitung Timur (Beltim), Kamarudin Muten kembali mengunjungi sekolah-sekolah di Kabupaten Beltim. Kali ini, Senin (28/7/25) kunjungannya ke tiga sekolah di Kecamatan Gantung. Kamarudin datang ke SMP Negeri 1, SD Negeri 6 dan SD Negeri 9 Gantung. Tidak sendiri, Bupati datang bersama dengan Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Dedy

Wahyudi dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Beltim, Bayu Priyambodo.

Di tiga sekolah ini Kamarudin memberikan arahan kepada guru dan siswa Tak lupa, Ia juga membagikan bantuan tas kepada siswa-siswi yang membutuhkan. Saat di SMP Negeri 1 Gantung, Kamarudin meminta para guru memberikan perhatian kepada siswa. Dengan memantau kondisi anak didik serta mau mendengarkan keluhan siswa layaknya anak sendiri.

“Kita minta para guru, baik guru kelas maupun BK untuk lebih peduli dengan anak asuhnya. Anggap siswa itu anak kita sendiri,” kata Kamarudin.

Kamarudin juga menekankan kepada para guru untuk lebih pro aktif mengawasi tingkah laku siswa terutama saat jam sekolah. Dia tidak ingin ada kejadian perundungan (bullying) terjadi di Kabupaten Beltim. “Kita tidak ingin kejadian seperti di Bangka Selatan (kasus bullying) atau yang terjadi di MTS Negeri Manggar terulang kembali. Sekiranya ada anak didik yang mengadu siswa lain membullynya, harus segera ditindak lanjuti,” ujar Kamarudin.

Selain itu, Bupati menyatakan dalam waktu dekat ini akan segera melantik para kepala sekolah yang berstatus masih pelaksana tugas. Hal ini penting agar kepala sekolah yang sudah berstatus definitif atau tetap dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas. “Kita segera lantiklah agar mereka dapat lebih konsentrasi dan maksimal dalam bekerja. Kita dak punya beban, namun saya ingatkan ASN jangan main politik,” tegas Kamarudin. (diskominfobeltim/as)

# Guru Olahraga Gantung Gelar Festival Satu Bulan



Bupati Beltim Kamarudin Muten saat membuka pertandingan sepakbola di Lapangan Sepak Bola Perol, Gantung, Rabu (30/07/25). (diskominfobeltim)

BABEL, BN – Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO) Kecamatan Gantung menggelar Festival Olahraga Anak tahun 2025. Sebanyak ribuan anak-anak dari tingkat SD dan SMP se-Kecamatan Gantung akan ikut dalam festival selama satu bulan lebih ini.

Festival dibuka oleh Bupati Belitung Timur (Beltim), Kamarudin Muten di Lapangan Sepak Bola Perol, Gantung. Pembukaan simbolis ditandai dengan penendangan bola saat Pertandingan Sepak Bola U15 anantara SMP Negeri 3 Gantung Vs MTS Muhammadiyah Gantung, Rabu (30/07/25) Pagi.

Kegiatan ini menjadi bagian untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, serta Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) Tahun 2025. Pelaksanaan dimulai sejak 30 Juli hingga 10 September 2025.

Ketua Panitia Pelaksana, Julian Candra Bayu mengungkapkan Festival Olahraga Anak akan memperlombakan enam cabang olahraga. Mulai dari: Sepak Bola U15, U12, dan U10, Bola Volly Putra Putri SD & SMP, Bola Kasti Putra SD & SMP, Catur SD, Tennis Meja SD & SMP, hingga Atletik Beregu SD.

“Kegiatan ini untuk mempererat persaudaraan dan menanamkan sportivitas sejak dini. Festival ini bukan sekadar lomba, tetapi juga ajang mempererat persaudaraan dan menumbuhkan semangat juang pada generasi muda,” kata Julian.

Guru Olahraga SD Negeri 8 Gantung ini menyatakan festival ini menjadi bukti nyata bahwa olahraga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang semangat kolaborasi, karakter, dan harapan bagi masa depan generasi muda di Kabupaten Beltim. “Kami bangga melihat antusiasme yang luar biasa dari para peserta, tentunya,” ujar Julian.

Didampingi Ketua KKGO Kecamatan Gantung Bilma Adhiono, Julian menambahkan olahraga bukan hanya soal prestasi, tetapi juga tentang membentuk karakter, disiplin, dan rasa tanggung jawab. (diskominfobeltim/as)



# Optimalkan Minapolitan dan Raiser Ikan Hias, Bupati Bogor Sinergi dengan KKP RI

**BOGOR, BN** - Untuk meningkatkan potensi perikanan, Bupati Bogor Rudy Susmanto, melakukan rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dan jajaran, acara rapat berlangsung di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis pekan lalu. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan minapolitan yang berada di wilayah Kabupaten Bogor.

Kawasan minapolitan Kab Bogor telah ditetapkan sejak tahun 2010 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kini menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan sektor perikanan terpadu yang berbasis wilayah. Bupati Bogor mengatakan, akan memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah, terutama dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha perikanan. Lanjut Rudy, di Kabupaten Bogor memiliki potensi besar di sektor perikanan. Sehingga ingin memastikan



Bupati Bogor Rudy Susmanto (Peci hitam), Sinergi Dengan KKP RI Sakti Wahyu Trenggono. (eml)

kawasan minapolitan dapat berkembang dengan maksimal dan di dukungan oleh infrastruktur, tata kelola, serta sinergi pusat dan daerah. “Ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beserta jajaran atas perhatian dan dukungan nyata bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bogor,” kata Rudy Susmanto. Ia juga menjelaskan, kegiatan hari ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Pemkab Bogor dengan Pemerintah Pusat dalam membangun sektor perikanan yang berkelanjutan berbasis potensi lokal. Selain kawasan minapolitan, kegiatan ini juga membahas pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas Raiser Ikan Hias yang berada di kawasan BRIN Cibinong. Bupati Bogor akan mendorong fasilitas tersebut untuk dikembangkan sebagai pusat inovasi dan ekonomi kreatif berbasis perikanan hias yang dapat mendongkrak nilai tambah serta daya saing komoditas unggulan daerah. (eml)

# Diduga Peras Pengusaha Kosmetik Rp 9,4 Juta, Oknum PDAM Bone Terancam Dipecat



**BONE, BN** - Direktur PDAM Wae Manurung Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Sairing, S.Sos menonaktifkan status kepegawaian AR alias Appant Chaloko (33) yang ditetapkan tersangka dalam

kasus dugaan pemerasan kepada pengusaha kosmetik bernama Sri Fardila (27) senilai Rp 9,4 juta. PDAM masih menunggu putusan pengadilan untuk memastikan status kepegawaiannya ke depan. “Kalau sudah ditetapkan tersangka, maka akan segera dinonaktifkan. Penonaktifan ini berlangsung sampai ada keputusan inkrah dari pengadilan nantinya,” ujar Direktur PDAM Wae Manurung Bone Bahtiar Sairing, pekan lalu.

“Kalau nanti hukuman-nya bebas, langsung diaktifkan kembali. Tapi, kalau dihukum penjara, langsung diberhentikan,” sambung Bahtiar. Bahtiar mengatakan, AR merupakan pegawai tetap di PDAM Bone. Pemberian sanksi kepada AR akan dilakukan sesuai dengan aturan di PDAM. “Iya, karyawan tetap itu (AR). Terkait dengan kasusnya kita ini BUMD milik pemerintah, pasti berdasar aturan yang ada, kalau dianggap berat, berarti sanksi pemberhentian,” katanya. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bone AKP Alvin Aji Kurniawan menambahkan, pihaknya sementara merampungkan berkas dari AR. Dia meng-agendakan pemeriksaan AR selaku tersangka pada Minggu (3/8) mendatang. “Berkasnya sementara dirampungkan. Kami juga sudah menyurati dan akan melakukan pemeriksaan pada 3 Agustus,” ucapnya. Sebelumnya diberitakan, oknum pegawai PDAM Wae Manurung Bone berinisial AR ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada pengusaha kosmetik bernama Sri Fardila senilai Rp 9,4 juta. Meski sudah tersangka, AR belum ditahan. “Sudah ditetapkan tersangka. Tapi belum dilakukan penahanan,” ujar Kasat Reskrim Polres Bone AKP Alvin Aji Kurniawan, Kamis (31/7). (Edys)

# Satpol PP Lampung Barat Tindak Tegas Prostitusi dan Miras

**LAMPUNG BARAT, BN** - Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat melaksanakan operasi penertiban terhadap dugaan pelanggaran Perda No 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Kegiatan ini dilakukan pada Minggu malam, 3 Agustus 2025, di sekitar wilayah Jerambah, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

Plt. Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat, Domi Nofalisa Utama Faizul, S.STP., M.Si., menyampaikan bahwa operasi ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat mengenai aktivitas yang meresahkan, seperti konsumsi minuman beralkohol, praktik prostitusi, serta kegiatan karaoke liar yang mengganggu ketenangan warga sekitar. “Laporan masyarakat menunjukkan bahwa lokasi tersebut kerap menjadi tempat berkumpul sekelompok orang yang melakukan aktivitas melanggar norma dan ketertiban. Tidak hanya itu, beberapa kali terjadi keributan hingga perkelahian yang mengancam rasa aman warga sekitar,” ujar Domi, Senin 4/8/2025. Atas dasar tersebut dan atas instruksi langsung dari Bupati Lampung Barat, tim gabungan dikerahkan untuk melakukan penertiban. Terlebih lagi, lokasi yang digunakan merupakan aset milik pemerintah yang tidak semestinya dimanfaatkan untuk kegiatan negatif. Operasi yang berlangsung secara humanis dan persuasif ini dipimpin oleh Kabit Penegakan Perda dan Perbup, Misranto, S.H., dengan melibatkan 16 personel. Penyisiran dilakukan secara menyeluruh di beberapa titik lokasi yang terindikasi kuat terjadi pelanggaran Perda. Hasil operasi menunjukkan bahwa di lokasi terdapat sekitar 35 orang pengunjung, baik di dalam maupun luar bangunan. Sebagian di antaranya tertangkap tangan sedang mengkonsumsi minuman keras, bernyanyi karaoke, serta terindikasi melakukan praktik prostitusi. Dari lokasi, petugas menyita 10 botol minuman beralkohol sebagai barang bukti, dan ditemukan 6 dus minuman beralkohol lainnya. Selain itu, sebanyak 17 wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial (PSK)



Petugas Satpol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Barat saat melaksanakan operasi penertiban terhadap dugaan pelanggaran Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. (Taufik)

wilayah, di antaranya Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jabodetabek, Tanggamus, dan Bandar Lampung, menandakan bahwa aktivitas ilegal ini telah melibatkan pihak luar daerah. Plt. Kasat juga menegaskan bahwa operasi ini bertujuan menciptakan efek jera serta mengembalikan fungsi ruang publik agar tidak disalahgunakan. “Kami berharap operasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat, khususnya di Way Tenong dan secara luas di wilayah Lampung Barat,” tutup Domi. Satpol PP Lampung Barat menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan peraturan daerah secara konsisten, dengan pendekatan yang tegas namun tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya menegakkan ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. (Taufik)

# Wakil Bupati Asahan Buka Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik



Wabup Asahan Rianto, saat membuka sosialisasi keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

**ASAHAN, BN** - Wakil Bupati, Asahan Rianto, SH., M.A.P Membuka sosialisasi keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (29/07/2025). Kegiatan ini juga turut di hadir oleh Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara, Staff Ahli, OPD, Sekretaris OPD, Camat, Kepala Desa serta hadirin lainnya. Laporan panitia dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan Jutawan Sinaga, S.STP., M.A.P menyampaikan tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman akan peran dan tanggung jawab PPID dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, memperkuat koordinasi antara PPID Utama dan Pelaksana, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan informasi yang lebih efektif. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan keterbukaan informasi juga merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Karena itulah setiap badan publik dituntut untuk lebih terbuka dengan pelaksanaan keterbukaan informasi akan berdampak secara internal maupun eksternal. Pemerintah Kabupaten Asahan telah menerbitkan surat keputusan Bupati Asahan No. 283-Kominfo-Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan. Lebih lanjut Wabup juga mengatakan sebagai aparaturnegara dan pengelola badan publik, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyediakan berbagai informasi dari Pemerintah Daerah yang harus kita sebar luaskan kepada masyarakat melalui berbagai saluran yang salah satunya adalah PPID. Sejalan dengan era globalisasi dan digitalisasi, layanan tentang keterbukaan informasi juga harus mengacu kepada penggunaan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, untuk itulah pada hari ini saudara-saudara diminta untuk mengikuti sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Asahan, OPD, Kecamatan, Perangkat Desa, dan para Kepala Sekolah di Kabupaten Asahan. “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sosialisasi keterbukaan informasi publik bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ini resmi saya buka”. Tandas Wabup membuka acara. Di tempat yang sama Ketua Komisi Informasi Sumatera Utara Dr. Abdul Harris Nasution, S.H., M.Kn, sebagai landasan hukum untuk memperoleh informasi bagi masyarakat, Pemerintah telah melahirkan undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (T.P)

# Sambut HUT RI Ke-80, Pemkab Bogor Bagikan Bendera Merah Putih Gratis



Pemkab Bogor Gelar Bagi-Bagi Bendera Merah Putih Serentak. (Eml)

**BOGOR, BN** - Menindaklanjuti arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih serentak di seluruh Kecamatan dari wilayah timur hingga barat, utara hingga selatan Kabupaten Bogor. Di wilayah tengah, kegiatan dipusatkan di Lapangan RBC, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, yang dihadiri langsung oleh Camat Cibinong bersama para lurah dari Kelurahan Cibinong, Sukahati, Karadenan, Ciri-mekar, dan Pabuaran Mekar. Selain pembagian bendera kepada warga, kegiatan juga diiringi dengan aksi pemasangan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintahan, termasuk Kantor Kecamatan Cibinong, Kantor Lurah Pondok Rajeg, dan titik-titik strategis di lingkungan sekitar. Di wilayah barat, seperti Kecamatan Leuwiliang, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ratusan bendera dibagikan kepada pengemudi angkutan umum, pelaku usaha kecil, dan warga yang melintas di pasar tradisional dan simpul-simpul transportasi. Camat Leuwiliang, WR Pelitawan menyatakan bahwa pihaknya bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor telah membagikan bendera merah putih kepada jajaran RSUD Leuwiliang, kemudian masyarakat, para pengendara angkutan umum, serta dilanjutkan dengan pemasangan bendera erah putih, umbul-umbul di kantor Kecamatan Leuwiliang. Gerakan ini adalah bentuk konkret menumbuhkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. “Kami ingin semangat kemerdekaan tidak hanya dirasakan di kantor-kantor pemerintahan, tapi juga di jalanan, pasar, dan kendaraan umum. Merah putih harus hadir di seluruh ruang publik selama bulan agustus,” ujar Camat Leuwiliang. Sementara itu di wilayah timur, Kecamatan Jonggol dan Kecamatan Cariu juga turut serta membagikan bendera kepada komunitas tani dan kelompok masyarakat desa. Di wilayah utara, seperti Babakan Madang, pembagian bendera dilakukan kepada para warga secara gratis, para supir angkot dan lainnya. (eml)

# Bupati dan Ketua DPRD Pesisir Barat Berharap Turnamen Sepak Bola Tumbuhkan Jiwa Solidaritas



Bupati dan Ketua DPRD Pesisir Barat bersama para pejabat dan stakeholder olahraga usai pembukaan turnamen sepakbola Bupati cup, Minggu 27/7/2025. (Diskominfortiksan Pesibar)

**PESISIR BARAT, BN** - Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, secara resmi membuka Turnamen Sepak Bola Bupati Cup 2025 yang digelar di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Minggu, 27 Juli 2025. Dalam sambutannya, orang nomor satu di Pesibar itu menegaskan bahwa turnamen tahun ini terasa istimewa karena menghadirkan dua kategori kompetisi, yakni kategori umum untuk menjangkir talenta muda berbakat, serta kategori U-40 sebagai bentuk penghargaan bagi para senior yang masih aktif di dunia olahraga. “Kedua kategori ini menunjukkan bahwa olahraga adalah milik semua kalangan dan usia. Melalui turnamen ini, kami berharap tidak hanya lahir prestasi, tetapi juga nilai-nilai positif seperti kerja sama, disiplin, solidaritas, dan persaudaraan,” ujar Bupati. Bupati menekankan bahwa turnamen ini menjadi momentum penting untuk mencari bibit atlet lokal berbakat yang dapat dibina untuk meraih prestasi di level regional, nasional, bahkan internasional. “Pemkab Pesibar



# Perbup Belum Turun, Retribusi Parkir RSUD Rantau Prapat Belum Bisa Diterapkan

## Abner Sitanggang 8 Tahun Terapkan Retribusi Parkir “Mencekik Leher”

LABUHANBATU, BN – Kepala bagian keuangan dan perencanaan Abner Sitanggang ST kembali dikonfirmasi awak media Bidik Nasional (BN) terkait retribusi parkir di RSUD Rantau Prapat, Selasa (29/7/25). BN menanyakan besarnya setoran dari pihak ketiga CV Padang Pasir Perkasa pemilik Rustam, selaku pengelola parkir di RSUD Rantau Prapat, namun Abner tidak menjawab.

BN kemudian ke Fahmi Kabag Hukum, juga tidak ada. Salah seorang ASN staf bagian hukum mengatakan, Kabag lagi ke Medan, “apa yang bisa di bantu pak.?” tanya dia. “Mau tanya dasar hukum retribusi parkir RSUD Rantau Prapat,” jawabnya ke BN. “Kalau untuk retribusi parkir RSUD Rantau Prapat Peraturan Bupati ( Perbup) belum turun pak dari atas, jadi belum bisa diterapkan retribusi parkir yang baru di RSUD Rantau Prapat pak,” jawabnya.

Terpisah DPRD Labuhanbatu yang menjabat Ketua DPC Gerindra Kabupaten Labuhanbatu H. Abdul Karim Hasibuan, SH, MH saat dimintai keterangan terkait Perbup tahun 2025 soal retribusi parkir RSUD Rantau Prapat mengatakan, “Kalau Perbup belum di teken oleh Bupati tahun 2025, berarti tarif parkir di RSUD masih tarif yang lama, untuk kendaraan roda dua Rp. 1.000 dan roda empat Rp. 2000,” ucapnya.

Untuk diketahui Abner Sitanggang ST lebih 8 tahun memiliki jabatan strategis di RSUD terapkan retribusi parkir di RSUD Rantau Prapat yang membuat kekisruhan dan keresahan masyarakat terapkan parker cukup tinggi “mencekik leher” , sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) untuk roda empat dan roda dua Rp. 5000 (lima ribu rupiah).



Abner Sitanggang, ST

Diberitakan BN sebelumnya, retribusi parkir di RSUD Rantau Prapat dikeluhkan pihak pasien dan pengelolaan parkir RSUD di pihak ketigakan, awak media BN mencoba menggali informasi tersebut dengan menemui Kabag Sekretariat di RSUD dr. NA, Senin 28/7/2025.

Disinggung soal retribusi parkir yang dikeluhkan keluarga Pasien, dr. NA mengatakan, “Ini bukan bagian saya, coba jumpai bagian SDM pak PS di ruangan nya,” ucapnya.

Dikonfirmasi via seluler, bagian SDM melalui PS (inisial nama) mengatakan, “Jumpa Kita di ruangan ketua di lantai empat ruangan SDM RSUD Rantau Prapat,” jelasnya.

Saat dijumpai di ruang kerjanya digali keterangan ke PS terkait pengelolaan parkir dipihak ketigakan oleh RSUD Rantau Prapat, PS mengatakan, “Pengelolanya CV Padang Pasir Perkasa,” jawab PS. “Karena bagian saya untuk teken kontrak antara pihak ketiga ke RSUD bang, lanjut untuk yang meneken kerja sama antara pihak RSUD dan pihak ketiga bang, diteken Direktur RSUD langsung,” tegasnya.

Disoal berapa tahun kontrak kerjasama antara pihak RSUD dan pihak ketiga, PS mengatakan satu tahun, dan disoal berapa pendapatan untuk 1 tahun hasil retribusi parkir yang disetor pihak ketiga ke pihak RSUD ditambahkan PS, “Langsung saja konfirmasi ke Kabag Keuangan bang, karena setoran retribusi parkir oleh pihak ketiga ke Kabag keuangan,” ujanya.

Di ruangan terpisah, selanjutnya BN menghubungi Kabag Keuangan RSUD Abner Sitanggang melalui via seluler Whatshap namun panggilan awak media tidak di jawab. (M.Sukma)

# Jalin Silaturahmi, Kalapas Rantauprapat Gelar Laga Trofeo Cup Bersama Insan Pers dan Masyarakat



LABUHANBATU, BN – Menyambut HUT Kemerdekaan ke-80 RI, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Rantauprapat menggelar pertandingan sepak bola exhibition, bertajuk Trofeo Cup bersama rekan-rekan wartawan dalam wadah Jurnalis Football Club (FC) serta diikuti tim Fun Football mewakili masyarakat sekitar.

Kegiatan Trofeo Cup yang diikuti oleh 3 tiga tim ini di gelar di Stadion Binaraga Rantauprapat, pada Minggu pagi, (03/08/2025) sekira pukul 08.00 Wib.

Adapun hasil jalannya pertandingan sepak bola Trofeo Cup ini Jurnalis FC meraih kemenangan dengan skor 2-1 kontra PS. Lapas Rantauprapat.

Kemudian Run Football bermain seri 1-1 bersua PS. Lapas. Selanjutnya pada pertandingan puncak Run Football bermain imbang 0-0 versus Jurnalis FC.

Atas hasil tersebut Jurnalis FC menasbihkan dirinya menjadi juara dengan memiliki poin lebih tinggi dari kedua Tim tersebut. Jurnalis FC (Point 4), Run Football

(Point 2), PS. Lapas Rantauprapat (Point 1).

Disela akhir pertandingan, Kalapas Kelas IIA Rantauprapat Khairul Bahri Siregar, Amd., IP., S.H., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan ajang Silaturahmi dengan rekan-rekan pers dan masyarakat di lingkungan sekitar.

“Kegiatan kita pagi ini dengan teman-teman pers, kemudian ada juga dari masyarakat melakukan pertandingan sepak bola untuk menyambut HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia Tahun 2025, kita sebut dengan kegiatan Trofeo Cup,” ujar Kalapas.

Lebih lanjut, kalapas menuturkan, mudah-mudahan tujuan kegiatan ini ingin menjalin silaturahmi, kebersamaan, baik dengan teman-teman pers dan masyarakat dari lingkungan sekitar.

Sementara itu perwakilan dari Jurnalis M. Sukma mengucapkan, terima kasih kepada Kalapas atas ide kegiatan yang sangat cemerlang ini.

“Artinya selain dari sisi jurnalis, rekan-rekan wartawan ada juga basic olahraganya sehingga dengan digelarnya Trofeo ini, rekan-tekan Jurnalis nanti akan aktif kedepannya,” ujar M.Sukma.

Masih kata M.Sukma, harapannya kepada Kalapas kegiatan ini berkesinambungan, diagendakan nantinya ada uji coba yang akan dilakukan selain Trofeo Cup ini.

“Terkait dengan program Bapak Kalapas di Kabupaten Labuhanbatu, baik olahraga maupun program kinerja lainnya, kami rekan-rekan Jurnalis siap mendukung,” tutup M.Sukma. (Red)

Sambungan hal 1

## Polda Jatim Bongkar ...

Larangan Sidoarjo, pada 25 Juli 2025 guna antisipasi peredaran beras oplosan di wilayah hukum Polresta Sidoarjo. Tim mendapatkan sample beberapa produk dan merk beras premium dan salah satunya dengan merk SPG. Selanjutnya dilakukan cek mandiri di kantor Bulog Surabaya diperoleh hasil, bahwa kualitas beras yang dijual tersebut diduga tidak sesuai dengan mutu standar atau kualitas premium.

Dari hasil kegiatan tersebut kemudian pada 29 Juli 2025 Tim Satgas Pangan Satreskrim Polresta Sidoarjo mendatangi tempat produksi beras premium oleh CV. Sumber Pangan Grup dengan merk SPG di Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo milik Sdr. MLH.

Hasil penyelidikan di lokasi tempat produksi beras merk SPG, disampaikan Kapolda Jatim Irjen. Pol. Nanang Avianto, dalam konferensi pers, Senin (4/8/2025), bahwa pemilik usaha tidak dapat menunjukkan bukti uji lab terhadap beras premium hasil produksi di

perusahaannya tersebut, Pemilik CV SPG tidak mempunyai kompetensi atau pengetahuan dalam hal produksi beras premium, terhadap mesin operasional tidak pernah dilakukan uji layak produksi dari pihak yang berwenang serta pada kemasan beras premium dengan merk SPG tercantum tanda SNI dan logo Halal yang pada faktanya belum mempunyai sertifikat tersebut.

“Atas dasar tersebut MLH beserta barang bukti diamankan ke Polresta Sidoarjo untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami juga melibatkan saksi ahli dari Badan Standarisasi Nasional, ahli dari perlindungan konsumen Disperindag Jatim dan uji laboratorium terkait standarisasi mutu beras premium dengan pengambilan sampel beras SPG,” ujar Kapolda Jatim Irjen. Pol. Nanang Avianto.

Lebih lanjut Irjen. Pol. Nanang Avianto memaparkan hasil beras oplos merk SPG, bahwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil komposisi beras tidak sesuai dengan standar mutu

(SNI beras Premium No. 6128 :2020) yang di tetapkan Permentan No. 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) No. 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. “Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, jangan sampai ada permainan soal mutu beras,” tegasnya.

Pemilik dari CV SPG sdr. MLH sejak tahun 2023 bergerak dalam bidang produksi beras premium merk SPG, dengan memiliki mesin sebanyak 3 seat dengan kapasitas produksi perjam yaitu sebanyak 2 Ton beras Premium sehingga dalam satu hari dapat memproduksi maksimal 12 Ton samapai 14 Ton beras per hari.

Terkait cara produksi beras SPG Premium yaitu dari bahan beras PK (Pecah Kulit) lalu dimasukkan mesin poles batu sebanyak dua kali, lalu turun ke ayakan menir kemudian masuk ke mesin Keti lalu masuk Sifter atau pemisah broken kemudian masuk kedalam mesin Color Sorter untuk memisahkan Benda –

benda yang tidak layak atau asing dan menjadi beras untuk diproses Packing.

Kemudian beras premium merk SPG, sebelum beras tersebut dikemas, tersangka mencampur beras hasil produksi dengan beras merk lain (merk Pandan Wangi). Tujuannya untuk memberikan aroma wangi pada beras hasil produksi, dengan perbandingan 10 (beras SPG) : 1 (beras Pandan Wangi) dalam satuan kilogram.

Polda Jawa Timur juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha pangan, agar tidak melakukan praktik manipulasi mutu, serta memastikan seluruh proses produksi memenuhi standar mutu nasional dan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami mengajak masyarakat agar lebih teliti dalam membeli produk beras. Pastikan label, mutu, dan kelegalan produk sebelum dikonsumsi. Bila masyarakat menemukan segala bentuk permainan bahan pokok maupun lainnya silahkan dilaporkan ke Polisi terdekat atau bisa melalui hotline.

(yah)

# DPC KAI Magetan Somasi KCP Nasari Madiun Pertanyakan Transparansi Asuransi Kredit Pensiun



Gunadi, S.H. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Magetan. (Ashar)

MAGETAN, BN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Magetan melayangkan somasi resmi kepada Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Nasari Madiun tertanggal 4 Agustus 2025 itu dengan tuntutan keterbukaan pihak koperasi terkait dokumen perjanjian asuransi atas nama Rachmad Sujitno seorang pensiunan asal Kecamatan Ngariboyo, Magetan.

Rachmad Sujitno telah memberikan kuasa hukumnya kepada Gunadi, S.H. dan Evita Anggrayny Dian Savitri, S.H., tertanggal 25 Juli 2025, akhirnya memberikan somasi terbuka, menuntut pihak Nasari

menyerahkan salinan polis atau sertifikat kepesertaan asuransi jiwa yang premi sebesar Rp16.318.000,- telah dibebankan kepada klien mereka saat pencairan kredit pada 22 September 2020.

“Premi tersebut jelas tercantum dalam rincian pencairan kredit. Klien kami memiliki hak mutlak untuk mengetahui dan mendapatkan salinan dokumen asuransi karena sebagai pihak bertanggung sekaligus pembayar premi,” ucap Gunadi, S.H.

“Kuasa hukum menilai penolakan pihak KCP Nasari Kota Madiun untuk memberikan salinan dokumen asuransi adalah tidak berdasar dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, sebagai hal tersebut termaktub dalam isi surat Somasi,” ungkap Gunadi

Lanjutnya pula, pihak kuasa hukum menuding dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan administrasi di tubuh koperasi Nasari. Dugaan ini didasarkan pada tidak terdebetnya dana pensiun klien mereka selama hampir tiga tahun, tanpa penjelasan yang jelas.

“Indikasi kuat adanya mal-administrasi, bahkan potensi penyalahgunaan dana asuransi oleh pihak internal koperasi meskipun tidak terlihatnya ada kerugian finansial langsung ke Klien kami,” kata Evita Anggrayny Dian Savitri, S.H.

Narasi dari Somasi ke KCP Nasari Kota Madiun tidak lupa mencantumkan dasar-dasar hukum yang mendasari tuntutan informasi ini, di antaranya:

Pasal 4 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas informasi yang benar dan jujur.

Pasal 26 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mewajibkan perusahaan asuransi memberikan polis kepada pemegangnya.

Pasal 1338 dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang kewajiban beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan larangan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan lembaga pengelola dana publik untuk transparan.

Kuasa hukum menegaskan bahwa KCP Nasari Madiun bekerja sama dengan BTPN dalam penyaluran kredit pensiun, yang menambah bobot urgensi tuntutan keterbukaan ini. Surat somasi yang telah disampaikan oleh DPC KAI Magetan memberi tempo waktu 3 (tiga) hari kerja sejak surat diterima oleh pihak koperasi. Jika dalam waktu tersebut permintaan tidak diindahkan, maka dari pihak kuasa hukum menyatakan akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana, termasuk gugatan ke Pengadilan Negeri dan laporan kepada aparat penegak hukum.

“Transparansi dalam praktik lembaga keuangan yang mengelola dana masyarakat, terutama pensiunan sangat perlu ditegakkan,” tegas Gunadi. (Ashar)

## Serahkan 23 SK ...

berpesan, nantinya selama bertugas, diharapkan agar selalu senantiasa mengedepankan bekerja dengan dengan tulus dan ikhlas. Layani masyarakat dengan penuh pengabdian, begitu juga dengan tenaga guru, didiklah para generasi bangsa ini dengan penuh kasih

sayang. Kelak mereka lah yang akan jadi penerus kemudian hari. “Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas serta bekerja samalah sebagai tim dalam tempat kerja kalian, fokuslah dalam bekerja,” tambah H. Zukri Disisi lain salah satu dari

Sambungan hal 7

23 CPNS terpilih Melva Ronasari putri batak boru sinaga saat di temui awak media, mengucapkan terimah kasih saat menerima SK, “Semoga amanah dan dapat mengemban tugas yang di percayakan kelak kepada saya,” ucapnya. (js)

## Bupati dan Ketua ...

berkomitmen mendukung kegiatan olahraga sebagai bagian dari pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat jasmani dan rohani,” tambahnya. Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar bertanding dengan menjunjung

tinggi sportivitas, menghormati lawan, serta menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung. Pembukaan turnamen bergengsi tingkat kabupaten ini turut dihadiri Wakil Bupati Irawan Topani, S.H., M.Kn., Ketua DPRD Mohammad

Sambungan hal 9

Emir Lil Ardi, S.H., Wakil Ketua II DPRD M. Amin Basri, Pj. Sekda Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., Ketua PSSI Pesibar Aris Ikhwanda, jajaran kepala OPD, tim peserta, serta ribuan masyarakat yang memadati arena pertandingan. (Taufik)

## Gubernur Khofifah ...

mengungkapkan kebanggaannya atas capaian Jawa Timur sebagai Juara Umum Lomba Kompetensi Siswa Nasional (LKS Dikmen) ke-33 Tahun 2025, yang sekaligus mencetak hattrick kemenangan tiga tahun berturut-turut.

“Saya ingin sampaikan, jangan pernah underestimate sesuatu. Sukses di persiapan penting, sukses di pelaksanaan penting, dan sukses di prestasi juga penting. Insyallah, dunia pendidikan kita akan terus kita jaga dan kita gerakan untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara,” kata Gubernur Khofifah.

Sambungan hal 12

Selain itu, Khofifah menyambut hangat kedatangan bukan hanya peserta namun juga Para Rektor Perguruan Tinggi PGRI di Bumi Majapahit, yang dikenal sebagai pusat nilai-nilai kebangsaan dan semangat kenusantaraan. “Selamat datang di Madiun, selamat datang di Jawa Timur, selamat datang di Bumi Majapahit. Selamat datang di bumi yang mengajarkan kenusantaraan dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka yang meminum air Majapahit, Insyallah cintanya ke Indonesia adalah cinta lahir batin,” ucapnya. (dji)

## Pengingatan Hari Bhakti ...

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. TNI AU tidak hanya hadir dalam menjaga kedaulatan udara, tetapi juga turun langsung membantu masyarakat. ini adalah bentuk pengabdian yang luar biasa,” ujar Ketua Fraksi PKB.

Dalam acara tersebut, diselenggarakan berbagai layanan sosial seperti pengobatan gratis, donor darah, pembagian sembako, serta pelayanan kesehatan lainnya yang ditujukan kepada masyarakat Desa Saptoreng-

go dan sekitarnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, Wakapolres Malang, dan tokoh penting lainnya. DPRD Kabupaten Malang menilai bahwa kegiatan ini sejalan dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup dan layanan dasar bagi masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan sosial.

Abdulloh Satar sekaligus selaku sekretaris komisi III DPRD, “Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus

dilanjutkan dan dikembangkan di wilayah lain di Kabupaten Malang. Semangat gotong royong dan kebersamaan ini harus terus dijaga,” ucapnya.

Dengan terselenggaranya acara ini, DPRD Kabupaten Malang juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan aktif, dan menegaskan komitmennya untuk terus emndukung program-program yang bersifat kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. (Adv/Nn)



### Korupsi MInyak

Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Seluruhnya ditempli stiker bertuliskan ‘Disegel Oleh Penyidik Jampidsus’.

Lima unit kendaraan yang disita terdiri dari tiga mobil sedan Mercy berkelir hitam, mobil Toyota Alphard hitam, hingga sebuah MINI Cooper berkelir putih. Dari lima mobil yang disita itu tak satupun yang memiliki pelat nomor. Kapus-penkum Kejagung, Anang Supriatna menyatakan kelima mobil itu memang disita dalam kondisi tanpa pelat nomor. “Penyidik temukan memang kondisinya begini, tidak ada pelat nomornya, sengaja untuk menghilangkan,” kata Anang kepada wartawan.

Anang mengatakan lima mobil itu disita dari pihak yang

### Proyek BKK...

sama dengan perangkat desa, namun akhirnya Kades bertindak sendiri dan tidak melibatkan bendahara desa dan perangkat desa. Kemudian anggaran tersebut dari desa dibawa oleh Kades Sura’i ke pihak ketiga disuatu tempat. “Saat pertemuan diduga ada Timlak (tim pelaksana) dan ada anggota DPRD Provinsi yang memberikan proyek tersebut untuk bagi-bagi persentase/komisi,” ujar sumber itu.

Staf DPRD Partai PKS Provinsi Jawa Timur, Aringga dikonfirmasi BN di rumahnya Senin (04/08/25) jam 15.48 mengatakan, “Untuk proyek desa Dorogowok tersebut murni tidak ada campur tangan saya, bukan seperti di Desa Jokarto dan di Desa Pulo Kec. Tempeh, kalau ini Kades Sura’i setelah serap aspirasi masyarakat (reses) memberikan proposal ke saya buat sendiri terus saya ajukan ke provinsi. Setelah cair saya mulai dari gambar dan RAB (rencana anggaran belanja) sudah ada orangnya yang bisa membantu dan membuatkan, yang jelas semua ini tanggungjawab Kades Sura’i sendiri,” tandas Aringga

Aringga mengatakan, “Saya di whatsapp dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah) provinsi Jatim terkait SPJ Desa Dorogowok, hanya sebatas itu saja, karena setahu mereka yang di provinsi itu ada saya. Kemudian saya tanyakan kepada Kades Sura’i, bahkan rekening koran setelah saya cek pengambilan dananya juga bertahap sesuai kebutuhan,” jelasnya Aringga.

Aringga mengatakan, anehnya kenapa anggaran sudah masuk rekening desa oleh Kades Sura’i dipindahkan ke rekening pribadi. Terbukti sudah saya cek di rekening koran yang ditunjukkan Kades Sura’i memang masuk rekening koran Kades Sura’I,” terangnya.

Ketua umum Perkumpulan Paralegal Republik Indone-sia (Perpari) angkat bicara, mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) Kepolisian dan Kejaksaan Lumajang mengusut dugaan korupsi ini. “Dugaan korupsinya jelas ada fisik proyek, ada transper dan rekening Koran, ada saksi bendahara dan perangkat desa yang dimintai keterangan. Ini bisa sebagai pelajaran agar tidak seenaknya pejabat Negara korupsi uang Negara,” tandas Ketua Umum Perpari Seperti diberitakan BN edisi 873/20-30 Juni 2025, Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Jawa Timur berupa Jasmas (Jaring Aspirasi Masyarakat) dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang ditempatkan di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dengan nilai sangat fantastis Rp 1. 475.000.000, - (1,475 Miliar), berupa bangunan drainase 3 Dusun di Lokasi yang berbeda : Dusun Panggung Gempol, Dusun Wringin Sari, Dusun Karangrejo.

### Usut Alih Fungsi ...

Kabupaten Lumajang. “Dokumen-dokumen ini akan menjadi bukti penting dalam proses penyidikan kasus korupsi ini,” kata Kosasih.

Dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi lahan Sungai Asem yang menca-

pai 9.600 meter persegi dan kini menjadi perumahan. Sungai Asem merupakan aset milik Pemerintah Pro-vinsi Jawa Timur dan tidak boleh digunakan tanpa izin resmi. “Sungai Asem seha-rusnya memiliki fungsi utama sebagai saluran air

### Oknum Polsek ...

anggota Polsek Bulu.

Sementara itu, sopir truk bebas leluasa melaju ken-cang dengan kecepatan ting-gi alias kabur, pada akhirnya sopir dan truk pengangsu hilang tidak ditemukan lagi kemudian 2 oknum anggota Polsek diduga pura pura mengejar tapi hasilnya nihil.

Sejumlah awak media kemudian mendatangi Pol-sek Bulu. Saat dikonfirmasi Kaniat Reskrim Polsek Bulu menyampaikan permohon-an maaf kepada awak me-

dia atas kinerja 2 anggotanya sehingga Truk ngangsu solar subsidi lepas kabur dan tidak ditemukan. Seharusnya 2 oknum anggota Polsek Bulu lang-sung menangkap mafia so-lar, sopir dan truknya, kemudian diamankan ke Polsek untuk diproses lebih lanjut. Diduga kuat kinerja 2 oknum anggota Polsek Bulu Polres Temanggung bekerja tidak sesuai SOP.

Perlu dicatat, penyalah-gunaan BBM bersubsidi

### Eksekusi Putusan MA ...

Slamet Setiawan, terpidana kasus tindak pidana korupsi PDAM Delta Tirta. Hal itu, diungkapkan setelah menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Slamet dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Putusan kasasi bernomor 3014 K/Pid.Sus/2025 tersebut diputuskan, pada, (15/5/2025), oleh majelis hakim agung yang diketuai Duwiarso Budi Santitarto.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun kepada Slamet Setiawan serta denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain pidana pokok, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengembalian (UP) kerugian negara sebesar Rp 3,9 miliar. Apabila tidak dibayar, terpidana akan menjalani tambahan hukuman tiga tahun penjara.

Kasi Intelijen Kejari Sidoarjo, Hadi Sutciptu, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan putusan tersebut dan menyatakan Kejari siap melaksanakan eksekusi penahanan terhadap Slamet Setiawan. “Salinan putusan kasasi sudah kami terima, pastinya akan dilakukan eksekusi penahanan,” tegas Hadi saat dikonfirmasi, Senin, (28/7/2025).

<p><i>Sambungan hal 1</i></p>
<p>terafiliasi dengan Riza Chalid. Kelima mobil itu disita penyidik dari hasil penggeledahan di daerah Jakarta Selatan. “Dari penggeledahan ini, kita mendapatkan barang-barang bukti yang diduga oleh penyidik ada kaitannya dengan kepemilikan atas nama tersangka MRC,” ujar Anang.</p> <p>Riza Chalid menjadi salah satu nama teranyar yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Setelah ditetapkan tersangka, Riza tercatat tiga kali mangkir panggilan Kejagung.</p> <p>Anang mengatakan dalam panggilan pemeriksaan tersangka yang ketiga pada Senin (4/8), Riza kembali absen tanpa memberikan konfirmasi. Kejagung ini tengah bersiap mengajukan red notice untuk Riza Chalid. <i>(sumber detik.com/*)</i></p>
<p><i>Sambungan hal 1</i></p>

Novi sebagai bendahara desa Dorogowok didampingi Herman Kaur Perencanaan, pada saat dikonfirmasi Bidik Nasional (BN) Selasa (25/03/2025) jam 12.06 WIB di Balai Desa Dorogowok menyampaikan secara detail penempatan lokasi proyek, transferan masuk senilai Rp. 1.475 Miliar, sampai uang tersebut diambil semua oleh Kades Sura’i. “Tapi uang itu dibawa kemana dan acara apa dengan siapa, saya tidak tahu,” kata Novi jujur.

Menurut sumber BN anggaran tersebut terserap di Desa Dorogowok Kec. Kunir Kab. Lumajang diterima Kades Dorogowok Sura’i beserta bendahara desa Novi, namun anggaran tersebut oleh Kades Sura’i dibawa kemana dan tidak ada yang tahu. Diduga uang diserahkan kepada pihak ketiga dan mereka diduga dapat fee. “Sebetulnya saya tahu nilai jumlah rupiahnya yang diterima, tetapi saya tidak berani menyebutkan karena khawatir Pak Kades Sura’i tidak mengakui/mengelak,” tandasnya.

Lanjut sumber itu, untuk pelaksanaan proyek harus ada SK dari desa dan juga ada pemberdayaan warga dilibatkan untuk bekerja dalam proyek tersebut,apakah betul-betul dilaksanakan?.

Sementara Advokat yang berdomisili di Lumajang, Heru Laksono,SH., mantan anggota DPRD Kab. Lumajang, menyoroti kasus ini kuat dugaan ada permainan proyek/ bancakan proyek BKK Provinsi Jawa Timur dengan nilai sangat fantastis Rp. 1.475 Milyar tersebut. “Apalagi proyek tersebut BKK Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, dan dikerjakan tahun 2025 sampai sekarang belum selesai, seharusnya bila pencairan dana sudah terlalu mepet akhir tahun 2024 dan bila dikerjakan saat itu tidak sampai dengan batas waktunya, sebenarnya biar dana tersebut masuk dana Silpa dan Tahun berikutnya masih bisa diharap untuk dimohon kembali,” ujarnya.

Dikatakan Heru temuan ini harus segera ditindak lanjuti jika ada dugaan indikasi penyimpangan, maka pihak berwenang/ APH harus mengambil langkah hukum, masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran BKK Provinsi Jawa Timur mereka kelola. Untuk proyek tersebut harus diawasi terus menerus secara ketat untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan standart yang ditetapkan, “Dugaan permainan dalam proyek BKK Provinsi Jawa Timur DPRD ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut, langkah tegas diharapkan mampu menjawab keresahan masyarakat dari pihak wewenang/ APH memastikan tidak ada dugaan penyalahgunaan anggaran proyek tersebut,” tegas Advokat Lumajang ini. *(Son/bersambung edisi berikutnya)*

<p><i>Sambungan hal 1</i></p>
<p>atau aliran sungai, namun kini telah berubah menjadi perumahan,” jelas Kosasih.</p> <p>Kejaksaan Negeri Lu-majang telah memeriksa 22 saksi dan akan berkoor-dinasi dengan ahli untuk menentukan kerugian ne-gara. Jika kerugian negara</p>
<p><i>(son)</i></p>

<p><i>Sambungan hal 1</i></p>
<p>merupakan tindak pidana serius. Pelaku penimbunan atau pengoplosan dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.</p> <p>Awak media mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kapolres Kabupaten Temanggung se-gera mengambil tindakan tegas karena di wilayah</p>
<p>hukumnya marak truk truk ‘penggarong’ BBM subsidi di SPBU SPBU nakal.</p> <p>Kami dari rekan rekan media juga meminta atensi khusus kepada Paminal Pol-da Jateng segera melakukan penyelidikan di Polsek Bulu Kabupaten Temanggung, tindak tegas 2 oknum an-gota yang bekerja tidak se-suai SOP, karena diduga ku-at sengaja melakukan pem-biaran melepaskan sopir dan truk pengangsu solar subsidi kabur. (Tim)</p>

<p><i>Sambungan hal 2</i></p>
<p>Namun, terkait waktu pelaksanaan eksekusi, Hadi menyebutkan bahwa hal itu menjadi kewenangan bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sidoarjo. Ia menyatakan belum dapat memastikan jadwal eksekusi secara pasti.</p> <p>“Terkait waktu kapan penahanannya, kami belum tahu. Nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Bidang Pidsus,” jelasnya.</p> <p>Dengan putusan kasasi ini, Slamet Setiawan dipastikan akan tetap dilakukan penahanan, meski masih memiliki upaya hukum lanjutan (PK).</p> <p>Perlu diketahui, di pengadilan tingkat pertama, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Ferdinand Marcus Leander membebaskan para terdakwa korupsi di KPRI Perumda Delta Tirta Sidoarjo itu.</p> <p>Ketiganya yakni, Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012-2014, Slamet Setiawan, bendaharanya Juriyah dan Samsul Hadi bagian Pasba (Sambungan Rumah) KPRI, pada (25/7/2024) lalu. Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi, juga menegaskan sudah menerima salinan putusan kasasi tersebut. “Sepertinya sudah mas (menerima salinan putusan),” ungkapnya. <i>(Teddy Syah)</i></p>

### Tersangka, Eks ...

wewenang pengelolaan aset daerah di Rusunawa Tam-bak Sawah. Ia ditetapkan bersama tiga tersangka lainnya, yakni SL, DP, dan ABT, pada, (22/7/2025).

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sidoarjo, John Franky Yanafia Ariandi mengatakan, meskipun Heri telah keluar dari rumah sa-kit, penahanan belum dilak-ukan lantaran kondisi ke-sehatan Heri belum mem-baik. “Yang bersangkutan masih rawat jalan. Kami akan cek dulu kesehatan-nya,” ujar Franky, pada,

### Warga Pertanyakan ...

garapan proyek jalan hotmix tersebut sangat kasar, kemarin sudah makan korban anak kecil, ada anak kecil jatuh sampai berdarah,” ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan Kepala Desa. Kwaron belum berhasil ditemui BN. Awak media mencoba mencari Kades di balai desa tapi juga tidak ada di tempat.

Sementara itu warga Desa Kwaron juga berharap kepada kepala desa agar terbuka terkait pembangunan di desa kwaron. “Jangan slintutan dengan warga, bila dikerjakan oleh pihak ketiga juga sampai kan kepada warga, jangan asal- asalan,” ujar warga setempat. “Selain itu, kami sebagai warga berhak mengetahui pada pembangunan itu, darimana anggaran yang dikucurkan dan berapa nilai nya, bahkan penggunaan anggaran harus ada kejelasan, karena menyangkut mutu dan kualitas pada bangunan,” ujar warga.

Perlu diketahui, Dasar Hukum dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018 mengatur tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang mencakup kewajiban memasang papan nama proyek. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) UU nomor 12 tahun 2014 dan nomor 29 tahun 2006 mengatur tentang kewajiban memasang papan nama proyek pada bangunan fisik yang di biayai oleh negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 mengatur bahwa kepala desa wajib menyampaikan informasi mengenai APB desa kepada masyarakat melalui media informasi termasuk papan informasi desa. UU tersebut sangat jelas tentang betapa pentingnya pemasangan papan nama proyek dan informasi kepada publik dan masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan dan dugaan yang di dasari pelanggaran transparansi oleh pihak pengelola proyek desa.

Sementara itu salah satu tokoh masyarakat setempat ketika di temui BN, menyampaikan, “Inilah akibat proyek di tangani oleh pihak ketiga, bukan di kerjakan oleh warga desa kwaron sendiri. Bukan warga yang di untungkan, tetapi kepala desa yang Untung. Siapa yang membawa rekanan yang memperkerjakan nya, kalau bukan kepala desa, ya beginilah jadinya, karena warga dianggap nggak tahu apa- apa, tetapi ternyata yang tidak becus ya kepala desa kwaron, karena menunjuk tekanan yang kurang di jamin tanggung jawabnya,” ungkapnya.

Selain itu, ada warga lain juga ikut bicara dan berpendapat, “Ini bukan sekedar masalah kualitas jalan, namun juga penggelapan uang rakyat, anggaran yang di gelontoran berasal dari pajak rakyat, makanya warga setempat merasa kecewa.” ujarnya lagi. *(Tok)*

### Kejari Sidoarjo ...

nal toko yang dilakukan oleh seorang pemuda, Moch. Wahyu Febri Ardiansah. Kasus ini mencuat setelah tersangka menjual motor milik bos ditempat kerjanya untuk membayar sewa kos.

Kepala Kejari Sidoarjo, Zaidar Rasepta, dalam sambutan menjelaskan, bahwa kejadian bermula pada Kamis, 17 April 2025, sekitar pukul 01.30 WIB. Saat itu, tersangka baru selesai bekerja di toko stiker AVS (Arif Variasi Sticker) di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

“Tersangka meminjam satu unit sepeda motor operasional toko, Yamaha Vega ZR warna hijau dengan stiker ‘PROSTEET’ dan nomor polisi W-4647-ZM kepada saksi korban, Zaenal Arifin, selaku pemilik toko,” jelas Zaidar.

Tersangka berdalil meminjam motor untuk mengantar ibunya berobat ke RSUD Sidoarjo. Karena percaya, korban mengizinkan penggunaan motor tersebut.

Namun, motor tidak dikembalikan. Tersangka justru membawanya ke rumah kos di Jalan Jeruk, Desa Wage. Keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 WIB, pemilik kos menagih pembayaran sewa yang belum dibayar.

Tersangka, yang tinggal bersama ibu dan dua adik berkebutuhan khusus, mengaku terdesak secara ekonomi. Ia pun memutuskan menjual motor tersebut secara daring melalui akun Facebook-nya dengan harga Rp1.300.000.

Tak lama kemudian, akun Facebook bernama ARA menghubungi tersangka. Melalui aplikasi WhatsApp, ARA— yang diketahui bernama Bodol —menawar

### BPKAD Jombang ...

Aset BPKAD Kabupaten Jombang yang diikuti oleh Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu dari seluruh Satuan Kerja se-Kabupaten Jombang. Rekonsiliasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencocokkan data transaksi keuangan dengan pembukuan BMD berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Dalam prosesnya, masing-masing pengurus barang melaporkan pembukuan BMD melalui sistem penatausahaan yang dikelola. Maka dari itu , tim dari Bidang Aset BPKAD selaku koordinator rekonsiliasi akan melakukan penyangندان data BMD dengan realisasi belanja yang tercatat dalam sistem keuangan daerah. Manakala ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian data, maka akan dilakukan penyesuaian yang dituangkan secara resmi dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Sementara menurut M. Nashrulloh, SE, MSI selaku Kepala BPKAD Kabupaten Jombang menjelaskan bahwa kegiatan rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan setiap Triwulan diharapkan menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan BMD yang transparan dan akuntabel. Rekonsiliasi juga akan mempermudah dan menjadi cara yang efektif dalam melakukan pemantauan dan pengendalian aset. Selain itu dengan rekonsiliasi ini para pengurus barang dan pengurus barang pembantu diharapkan lebih cermat dan teliti dalam melakukan pengelolaan BMD di masing-masing OPD sehingga data BMD yang dihasilkan menjadi lebih valid. Maka dengan terwujudnya data BMD yang valid dan disajikan tepat waktu akan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik dan akuntabel. *(Tok)*

<p><i>Sambungan hal 1</i></p>
<p>Senin (4/8/2025).</p> <p>Franky menambahkan, pihaknya belum dapat me-mastikan jadwal penahanan terhadap Heri. Namun, pe-manggilan akan dilakukan untuk proses pemeriksaan jika kondisinya telah mem-baik. “Kalau memang sudah sehat, kami panggil yang bersangkutan untuk dimin-tai keterangan,” tegasnya.</p> <p>Kasus ini berkaitan de-ngan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan Mendagri No-mor 152 Tahun 2004 dan Per-mendagri No 19 Tahun 2016</p>
<p>tentang pedoman pengelo-laan barang milik daerah.</p> <p>Keempat tersangka di-duga tidak menjalankan fungsinya sebagai pengguna barang sesuai aturan per-undang-undangan yang berlaku. Akibatnya, negara diperkirakan merugi hingga Rp 9,75 miliar dalam kurun waktu 2008 sampai 2014.</p> <p>Saat ini, penyidik Kejari Sidoarjo masih mendalami keterlibatan masing-masing tersangka, sembari menung-gu proses pemeriksaan lan-jutan terhadap Heri Soesan-to. <i>(Teddy Syah)</i></p>

<p><i>Sambungan hal 1</i></p>
<p>motor dengan harga Rp1.050.000.</p> <p>“Tersangka menyetujui tawaran tersebut. Mereka sepakat bertemu di McDonald’s Geluran, Kecamatan Taman, untuk bertransaksi,” ungap Kajari.</p> <p>Di lokasi pertemuan, disepakati uang sebesar Rp1.050.000 diserahkan oleh pembeli kepada tersangka. Sepeda motor pun dibawa pergi oleh si pembeli.</p> <p>Uang hasil penjualan digunakan tersangka untuk membayar sewa kos dan memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya.</p> <p>Atas perbuatannya, korban Zaenal Arifin yang merupakan bosnya mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000. Namun, pendekatan restorative justice (RJ) ditempuh oleh Kejari Sidoarjo dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonominya pelaku.</p> <p>Disisi lain, Bupati Sidoarjo, Subandi, saat sambutan juga menyampaikan apresiasiya atas langkah Kejari Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. “Melalui keadilan restoratif, negara memberikan kesempatan kepada warga untuk memperbaiki diri. Ini adalah bentuk keadilan yang menyentuh hati,” ujar Subandi.</p> <p>Ia juga menilai bahwa proses hukum yang dijalankan secara manusiawi dapat menjadi refleksi bagi seluruh elemen masyarakat. “Saya menyampaikan terima kasih kepada jajaran kejaksaan yang telah memberikan pengampunan kepada warga kami yang khilaf, demi masa depan yang lebih baik,” pungkas Subandi.</p> <p><i>(Teddy Syah)</i></p>

#### Sambungan hal 4



# Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Prioritas

## ❑ Membangun Bersama, DPRD dan Pemkab Pasuruan Sahkan Raperda P-APBD 2025



SENERGI KOLABORASI: Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo (Kiri) bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan menunjukkan Nota Kesepakatan Raperda P-APBD 2025



KOMITMEN BERSAMA: Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menandatangani Nota Persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



KOMITMEN BERSAMA: Bupati Pasuruan H.M. Rusdi Sutejo menandatangani Nota Persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.



**PASURUAN, BN** – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Peruba-

han Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna IV DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar, Senin (28/7/2025) di ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Pasuruan dengan ditandai penandatanganan Nota Persetujuan bersama Raperda P-APBD tahun 2025. Persetujuan merupakan hasil dari proses pembahasan

yang intensif dan mendalam antara eksekutif dan legislatif sejak awal Juli 2025, silam. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dalam pidato - penutupnya tegas menyampaikan jika pembahasan Raperda perubahan APBD dilakukan secara intensif selektif dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari fraksi dan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. “Seluruh masukan telah dikaji bersama untuk menyempurnakan Raperda kali ini. Melalui persetujuan ini, kami berharap pemerintah

daerah dapat lebih optimal dalam melaksanakan program prioritas pembangunan daerah, infrastruktur dan Pendidikan,” katanya. Lebih lanjut politisi senior partai besutan Muhaimin Iskandar itu menambahkan, pelaksanaan APBD hasil perubahan ini harus terus diawasi dan dievaluasi agar sejalan dengan tujuannya menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. “Mudah-mudahan, melalui APBD ini, kita semakin dekat pada cita-cita menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai daerah yang maju,

sejahtera, dan berkeadilan,” tutupnya optimis. Terpisah, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menekankan, dokumen Perubahan APBD bukanlah sekedar administrasi keuangan. melainkan instrumen paling penting untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. “Perubahan APBD 2025 mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dinamika sosial, dan kebutuhan masyarakat, serta realisasi belanja yang berjalan pada

satu tahun anggaran,” Mas Rusdi sapaan akrab Bupati Pasuruan itu juga menyampaikan apresiasi - kepada seluruh jajaran Pimpinan, anggota DPRD yang telah memberikan ruang dialog dan diskusi yang produktif sepanjang proses pembahasan berlangsung. Lebih lanjut dikatakan, - kesepakatan ini bukti nyata kuatnya semangat kolaborasi antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. “Persetujuan ini juga menjadi indikator akuntabilitas dan komitmen kita

dalam memperbaiki efektivitas program kegiatan pembangunan. Setiap angka dalam APBD memiliki implikasi secara langsung pada pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” urainya. Dalam Raperda Perubahan APBD 2025, pemerintah Kabupaten Pasuruan bakal mempercepat program-program prioritas, peningkatan infrastruktur dasar, hingga pelayanan pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi sektor usaha kecil dan menengah menjadi konsent. (\*)

## Gubernur Khofifah Komitmen Wujudkan SDM Unggul di Jatim Jemput Indonesia Emas



Gubernur Khofifah foto bersama dengan para peserta. (ist)

**MADIUN, BN** – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pihaknya berkomitmen dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di Jawa Timur dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan di hadapan Rektor Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) se-Indonesia saat Gala Dinner Welcoming Ceremony Pekan Olahraga

dan Seni Nasional Mahasiswa (PORSENASMA) V Perguruan Tinggi PGRI Tahun 2025, yang digelar di Bakorwil Madiun, Senin (4/8). “Kami sangat serius menyambut Indonesia Emas. APBD Jawa Timur dialokasikan cukup besar untuk sektor pendidikan. Kami ingin memastikan bahwa kualitas SDM Jawa Timur menjadi penopang kekuatan bangsa di masa depan,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan yang unggul bukan hanya soal keilmuan, tetapi juga pendidikan karakter. Oleh karena itu, Pemprov Jatim sangat menghargai peran guru dan terus memperkuat pendidikan yang berimbang antara kecerdasan intelektual dan integritas moral. “Jadi yang harus diajarkan tidak hanya keilmuan tapi juga karakter. Pintar juga harus diikuti dengan sesuatu yang benar. Pintar dan benar harus berseiring. Inilah yang menjadi pondasi utama dalam mencetak generasi emas Indonesia,” katanya. Untuk itu, Gubernur Khofifah juga menekankan pentingnya untuk selalu menghormati dan menghargai jasa guru. “PGRI ini akan menjadi referensi besar bagi kita semua untuk bisa menghargai jasa para guru. Sahabat-sahabat semua juga masuk pada profesi masing-masing karena dididik, dibina, dibimbing, dibesarkan oleh para guru. Maka, yang belum sempat memberi penghormatan bagi guru,

mulai hormatilah,” lanjutnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengutip kisah inspiratif dari Kaisar Jepang pasca-Perang Dunia II untuk menekankan peran strategis guru dalam membangun peradaban bangsa. “Saat Nagasaki dan Hiroshima dibom, Kaisar Hirohito bertanya berapa jumlah guru yang tersisa. Nagasaki dan Hiroshima tidak hanya rata, tapi mereka punya masalah serius. Dia ingin membangun kembali peradaban Jepang, maka yang dicari guru. Karena yang membesarkan kita, membesarkan bangsa, membesarkan dunia, adalah guru. Insya Allah menjadi guru adalah jariah panjenengan

semua,” pungkasnya. Tak hanya itu, dukungan pendidikan juga dilakukan sistem pencakokan. Seperti yang dilakukan Jawa Timur bekerjasama dengan berbagai universitas level dunia di daerah, seperti King’s College London, Western Sydney University, dan yang akan datang Queen Mary University of London (QMUL). “Keinginan mencangkok pendidikan seperti King’s College London dilakukan untuk menguatkan SDM di Jatim,” jelasnya. Berkat dedikasi ini, Jawa Timur telah banyak memetik buah hasil. Sebab, baru-baru ini, Gubernur Khofifah

■ Bersambung ke hal.10 kol.5

## Peringatan Hari Bakti ke-78 TNI AU, DPRD Kabupaten Malang Beri Apresiasi



Kegiatan bakti sosial yang digelar oleh TNI AU dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU ke-78 di Kantor Desa Saptorenggo, Pakis, Kabupaten Malang.

**KAB.MALANG, BN** – DPRD Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan bakti sosial yang digelar oleh TNI Angkatan Udara dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI AU ke-78 di Kantor Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, Jum’at (25/7). Kegiatan sosial yang diprakarsai oleh Lanud Abdulrachman Saleh ini dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian TNI AU terhadap kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah pedesaan. Abdulloh Satar, SE., MM yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi seperti ini sangat penting dalam membangun sinergi antara institusi negara dan masyarakat. ■ Bersambung ke hal.10 kol.5

80

Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju

MKKS  
SMA NEGERI  
MAGETAN

Mengucapkan

DIRGAHAYU  
REPUBLIK  
INDONESIA

17 AGUSTUS 1945 - 17 AGUSTUS 2025

ARIS SUDARMO

Made with twibbonize